

**LAPORAN KINERJA (LKj)  
KECAMATAN BAJUIN  
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
KECAMATAN BAJUIN  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Bajuin Tahun 2022 dapat terselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Bajuin disusun sebagai perwujudan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Bajuin sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kecamatan Bajuin Tahun 2019–2023.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Bajuin tahun 2022 ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga tersusunnya laporan ini.

Bajuin, Januari 2023

  
**CAMAT BAJUIN**  
  
**Wisnu Kuntarto, S.STP**  
**NIP. 19840528 200312 1 005**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah Kecamatan Bajuin Tahun 2022 merupakan wujud Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bajuin kepada publik/pemberi mandat yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta pelaksanaan Penetapan/Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Bajuin Tahun 2018-2023 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019. Laporan Kinerja ini merupakan laporan kinerja keempat RPJMD 2018–2023. Selain media pertanggungjawaban kinerja kepada publik/pemberi mandat, Laporan Kinerja ini juga merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian Kinerja Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

Sebagai perwujudan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bajuin kepada publik/pemberi mandat yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan kecamatan Bajuin dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya, kecamatan bajuin telah menetapkan ukuran keberhasilannya berupa 1 sasaran yang diukur 1 Indikator kinerja Utama, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja tahun 2022 dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis di atas.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 dapat dikatakan **Sangat Baik/ Sangat Berhasil**. Hal ini, didasarkan pada hasil pengukuran target terhadap pencapaian sasaran yang didukung dengan program / kegiatan dan berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut 2022 dan Penetapan Kinerja (PK) Kecamatan Bajuin Tahun 2022.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian terhadap **1 Sasaran 1 Indikator Kinerja Utama dengan tingkat capaian kinerja sangat memuaskan.**

yang sudah diuraikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja seluruh indikator adalah 110,71 %.

Penyusunan Laporan Kinerja kecamatan bajuin Tahun 2022 ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*), mendorong perbaikan instansi pemerintah yang akuntabel, beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, serta menghasilkan umpan balik bagi pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah yang bermuara pada peningkatan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Bajuin, Januari 2023

**CAMAT BAJUIN**



**Wisnu Kuntarto, S.STP**

**NIP. 19840528 200312 1 005**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi .....	2
C. Isu Startegis .....	20
D. Produk dan Layanan .....	22
E. Sistematika Penyajian .....	23
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA</b> .....	25
A. Visi .....	25
B. Misi .....	28
C. Tujuan dan Sasaran Strategis .....	29
D. Indikator Kinerja Utama .....	31
E. Perjanjian Kinerja .....	32
F. Program dan Kegiatan .....	37
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	39
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi .....	39
B. Akuntabilitas Keuangan .....	83
<b>BAB IV. PENUTUP</b> .....	90
A. Simpulan .....	90
B. Strategi Peningkatan Kinerja .....	90
<b>LAMPIRAN</b>	

---

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

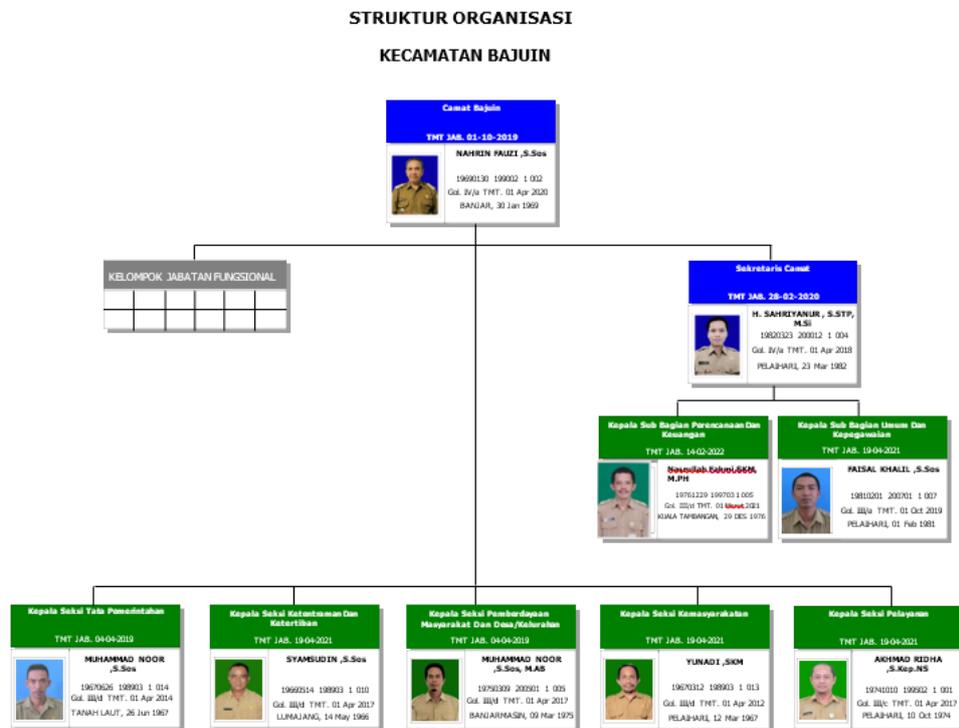
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja yang disusun oleh setiap Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Atas dasar tersebut Camat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Bajuin secara periodik setiap akhir tahun anggaran sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu Laporan Kinerja (LKj) disusun sebagai bahan dan media penyusunan Laporan Kinerja (LKj) pertanggungjawaban Bupati kepada masyarakat serta pihak lain yang berkepentingan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Governance) sesuai dengan tuntutan masyarakat.

## B. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi

Struktur Organisasi Kecamatan Bajuin sesuai dengan Perbub 114 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi & tata kerja pada kabupaten tanah laut.



Gambar 1. Struktur Organisasi Kecamatan Bajuin Tahun 2022

Pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, dimana Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :
  - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Tata Pemerintahan

- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/kelurahan
- f. Seksi Kemasyarakatan
- g. Seksi Pelayanan, dan
- h. Kelompok jabatan fungsional.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan rumah tangga daerah, untuk melaksanakan tugas tersebut Camat mempunyai uaian tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan perencanaan strategis kecamatan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
- b. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pemerintahan di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Mengoordinasikan membina dan mengawasi kegiatan dalam bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 
- g. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan pelayanan umum dan masyarakat di kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang dilimpahkan kepada kecamatan;
  - i. Mengoordinasikan kegiatan dalam bidang penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan daerah di wilayah kecamatan;
  - j. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pemeliharaan prasarana, sarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan;
  - k. Mengoordinasikan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembinaan keagrariaan, dan pembinaan politik dalam negeri;
  - l. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
  - m. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
  - n. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
  - o. Mengendalikan pengelolaan urusan kesekretariatan;
  - p. Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kecamatan;
  - q. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan;
  - r. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
  - s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya.

Kecamatan Bajuin untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dilengkapi dengan unsur-unsur organisasi, yang terdiri dari :

## 1. Sekretariat

Sekretariat Kecamatan Bajuin dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan rencana kegiatan Kecamatan, mengelola urusan keuangan, mengelola urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta pengelola urusan administrasi kepegawaian. Uraian tugas sekretaris adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran kecamatan;
- b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana strategis;
- c. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan kecamatan;
- d. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- e. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset kecamatan;
- f. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- g. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- h. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tata laksana;
- i. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan hubungan masyarakat dan protokol;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dimaksud Sekretariat Kecamatan Bajuin ini dilengkapi dengan 2 (Dua) Sub Bagian yaitu :

**1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan program dan rencana kegiatan keuangan dan mengelola keuangan serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan, Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun program, rencana kegiatan anggaran kecamatan;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, revisi anggaran;
- f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik kecamatan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kegiatan rutin;
- j. melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- k. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;

- l. melaksanakan urusan gaji pegawai;
- m. melaksanakan administrasi keuangan;
- n. melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- o. melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- p. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
- r. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

## **2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta mengelola administrasi kepegawaian. Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. melaksanakan urusan tata usaha kearsipan;

- 
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
  - g. menyiapkan bahan dan mengelola data, dokumen dan informasi kepegawaian;
  - h. menyiapkan bahan dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
  - i. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
  - j. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
  - k. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  - l. melaksanakan telaahan, penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - m. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
  - n. melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
  - o. melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;
  - p. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian umum dan Kepegawaian; dan
  - q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

## **2. Seksi Tata Pemerintahan**

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, Uraian tugas Seksi Tata Pemerintahan sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum tingkat kecamatan, desa dan kelurahan;
- c. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan;
- d. melaksanakan sebagian tugas dalam hal pajak bumi dan bangunan;

- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan tugas bidang pertanahan di Kecamatan;
- f. melakukan penataan dan pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan;
- g. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi administrasi kependudukan;
- h. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kependudukan di wilayah kecamatan;
- i. menyiapkan bahan dan memproses pelayanan administrasi kependudukan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan dalam rangka peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- k. mengoordinasikan kegiatan pengumpulan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemilu lingkup kecamatan meliputi pemilihan kepala desa dan penjaringan aparat desa;
- l. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi instansi di daerah, fasilitasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada;
- m. mengoordinasikan persiapan dalam rangka pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional/daerah;
- n. menyiapkan bahan dan memfasilitasi perselisihan antar desa bidang pemerintahan;
- o. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Tata Pemerintahan; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

### **3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan

- 
- lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban sebagai pedoman dan landasan kerja;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya dalam kegiatan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
  - d. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan;
  - e. mengolah dan memproses rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
  - f. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - g. menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang ketentraman dan ketertiban;
  - h. menyiapkan bahan materi penyuluhan mengenai ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan wilayah Kecamatan;
  - i. melaksanakan pengawasan perizinan di kecamatan;
  - j. mengolah dan memproses Surat ijin penutupan jalan tertentu, ijin parkir tidak tetap, Surat Jalan dan Surat Keterangan lainnya yang menjadi kewenangannya;
  - k. melaksanakan penarikan pajak hiburan untuk persewaan VCD dan pajak restoran untuk PK 5;
  - l. memberdayakan potensi perlindungan masyarakat;
  - m. melaksanakan tugas pembantuan operasional yang berkaitan dengan :
    1. Penanggulangan bencana.
    2. Penertiban terhadap gelandangan, pengemis dan penyandang masalah sosial lainnya.
    3. Penertiban dan pencegahan terhadap penyakit masyarakat (pekat).
    4. Melakukan pengamanan terhadap kejadian kebakaran, orang bunuh diri, kecelakaan, kematian yang tidak sewajarnya dan penemuan mayat.
    5. Memantau dan membina pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
-

- n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketentraman lingkungan;
- o. melaksanakan pengawasan dan memantau penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian kampung;
- p. melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketentraman lingkungan dan melakukan kegiatan pengamanan wilayah;
- q. mengawasi pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
- r. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- s. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### **4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menyusun dan melaporkan data monografi kecamatan serta profil desa dan kelurahan;
- c. menyiapkan bahan perumusan rencana pembangunan kecamatan (musrenbang);
- d. mengoordinasikan, memfasilitasi dan memberikan pelayanan administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- e. mengoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kegiatan perekonomian;
- g. melaksanakan dan mengoordinasikan penyuluhan usaha kecil, mikro dan menengah kepada masyarakat lingkup kecamatan;

- h. melaksanakan dan mengoordinasikan penyuluhan usaha kecil, mikro dan menengah kepada masyarakat lingkup kecamatan;
- i. menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang perekonomian, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan swadaya dan pemberdayaan masyarakat;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kegiatan perekonomian;
- l. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi Daerah di wilayah kecamatan;
- m. menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa bidang perekonomian, pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- n. menyiapkan bahan dan menyelenggaraan lomba/penilaian desa/kelurahan tingkat kecamatan;
- o. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### **5. Seksi Kemasyarakatan**

Seksi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja Seksi Kemasyarakatan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan kesejahteraan rakyat;
- c. menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang kemasyarakatan;
- d. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan dan peranan wanita;

- 
- e. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan kemasyarakatan;
  - f. menyusun program kerja pelaksanaan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, pembinaan kepemudaan serta olah raga termasuk pengentasan kemiskinan;
  - g. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyaluran bantuan sosial terhadap bencana alam dan bencana lainnya;
  - h. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan;
  - i. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pembinaan lembaga adat dan komunitas adat terpencil serta organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
  - j. menyiapkan bahan dan memfasilitasi penanggulangan masalah sosial, pencegahan dan penanggulangan bencana dan pengungsi;
  - k. menyiapkan bahan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program pengembangan dan peningkatan kesehatan masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana;
  - l. mengoordinasikan kegiatan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, zat aditif) obat dan bahan berbahaya lainnya;
  - m. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
  - n. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kemasyarakatan; dan
  - o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

## 6. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan pembinaan pelayanan di wilayah Kecamatan;
- d. menyelenggarakan pelayanan administrasi kecamatan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan inovasi-inovasi pelayanan;
- f. memeriksa dokumen/berkas pemohon pelayanan administrasi kecamatan;
- g. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan administrasi kecamatan;
- h. mengadministrasikan pelayanan penyelenggaraan pelayanan administrasi kecamatan;
- i. menyerahkan dokumen layanan administrasi kecamatan;
- j. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data dan informasi pelayanan administrasi kecamatan;
- k. melaksanakan administrasi, fasilitasi dan upaya pemecahan masalah pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan administrasi kecamatan;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pelayanan; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan-kegiatan lainnya, Kecamatan Bajuin didukung oleh aparatur beserta sarana dan prasarana penunjang operasional kantor. Jumlah Pegawai Lingkup Kantor Kecamatan Bajuin sebanyak 22 (dua puluh dua) orang terdiri dari 14 (empat belas) orang PNS dan 8 (delapan) Orang PTT (non PNS). Adapun lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

**Tabel 1. Daftar Jabatan, Esselon , Status Kepegawaian Dan Jumlah PNS/Non PNS Lingkup Kantor Kecamatan Bajuin**

No.	Nama Jabatan	Esselon	Status		Jumlah
			PNS	Non PNS	
1	Camat	III.a	1		1
2	Sekretaris	III.b	1		1
	a. Kasubag. Umum dan Kepegawaian	IV.b	1		1
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)		1	4	5
	b. Kasubag Perencanaan dan Keuangan	IV.b	1		1
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)		2	1	3
3	Kasi tata Pemerintahan	IV.a	1		1
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)				0
4	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	IV.a	1		1
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)				0
5	kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	IV.a	1		1
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)			1	1
6	Kasi Kemasyarakatan	IV.a	1		1
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)		1		1
7	Kasi Pelayanan	IV.a	1		1
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)		1	2	2
<b>JUMLAH</b>			<b>14</b>	<b>8</b>	<b>22</b>

Kondisi kepegawaian berdasarkan pangkat dan golongan lingkup kantor kecamatan Bajuin untuk golongan IV sebanyak 2 (dua) orang, Golongan III sebanyak 8 (delapan) orang, golongan II sebanyak 3 (tiga) orang dan golongan I sebanyak 1 (satu) orang. Adapun lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

**Tabel 2. Daftar Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat dan golongan Lingkup Kantor Kecamatan Bajuin**

<b>NO</b>	<b>Jenis Pangkat</b>	<b>Golongan/Ruang</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Pembina Utama	IV/e	-
2.	Pembina Utama Madya	IV/d	-
3.	Pembina utama Muda	IV/c	-
4.	Pembina Tk. I	IV/b	-
5.	Pembina	IV/a	2
<b>JUMLAH</b>			<b>2</b>
6.	Penata Tk.I	III/d	4
7.	Penata	III/c	1
8.	Penata Muda Tk.I	III/b	2
9.	Penata Muda	III/a	1
<b>JUMLAH</b>			<b>8</b>
10.	Pengatur Tk.I	II/d	1
11.	Pengatur	II/c	2
12.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	-
13.	Pengatur Muda	II/a	-
<b>JUMLAH</b>			<b>3</b>
13.	Juru Tk.I	I/d	-
14.	Juru	I/c	-
15.	Juru Muda Tk.I	I/b	1
16.	Juru Muda	I/a	-
<b>JUMLAH</b>			<b>1</b>
<b>TOTAL</b>			<b>14</b>

Jenjang pendidikan pegawai kantor Kecamatan Bajuin untuk jenjang pendidikan sekolah dasar sebanyak 2 (dua) orang, Jenjang SLTA/SMK sebanyak 8 orang, Jenjang D3 sebanyak 2 (dua) orang, jenjang D.4/S1 sebanyak 7 (tujuh) orang dan master/pasca sarjana (S2) sebanyak 2 (dua) orang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

**Tabel 3. Daftar Jumlah pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan Lingkup Kantor Kecamatan Bajuin**

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH (Org)		
		PNS	Non PNS/PTT	Jumlah
1.	SEKOLAH DASAR	1	1	2
2.	SLTP	-	-	-
3.	SLTA/SMK	2	6	8
4.	D.1	-	-	-
5.	D.2	-	-	-
6.	D.3	2	1	3
7.	D.4	1	-	1
8.	SARJANA	6	-	6
9.	MASTER/PASCASARJANA	2	-	2
10.	DOKTER/S3	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>14</b>	<b>8</b>	<b>22</b>

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparat Kecamatan Bajuin didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

**Tabel 4. Daftar Jenis, Jumlah dan Kondisi Sarana Prasarana Lingkup Kantor Kecamatan Bajuin**

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			B	KB	RB
1	2	3	4	5	6
1	Tanah perkantoran	3 ha	3 ha	-	-
2	Gedung kantor	1	1	-	-
3	Bangunan rumah dinas camat	1	1	-	-
4	Bangunan tempat parkir	1	1	-	-
5	Kendaraan Roda 2	8	8	-	-
6	Kendaraan Roda 4	1	1	-	-
7	Komputer	5	5	-	-
8	Laptop	5	5	-	-
9	Printer	9	9	-	-
10	Mesin tik	2	2	-	-
11	Kursi Lipat	70	70	-	-
12	Kursi Tamu	1	1	-	-
13	Kursi Putar	2	2	-	-
14	Meja Kerja	14	14	-	-
15	Meja Rapat	22	22	-	-
16	Whiteboard	2	2	-	-
17	Filling Cabinet	8	8	-	-
18	Tempat tidur	2	2	-	-
19	Papan struktur	8	8	-	-
20	Lemari Es	2	2	-	-
21	Rak besi	2	2	-	-
22	Mesin potong rumput	3	3	-	-
23	TV	4	4	-	-

**Lanjut...**

---

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			B	KB	RB
1	2	3	4	5	6
24	Brangkas	1	1	-	-
24	Wirelles	2	2	-	-
26	Parabola	1	1	-	-
27	CPU	2	2	-	-
28	AC	4	4	-	-
29	Jam dinding	1	1	-	-
30	Kipas Angin	5	5	-	-
31	Dispenser	1	1	-	-
32	LCD Proyektor	1	1	-	-
33	Soundsystem	1	1	-	-
34	Lemari Arsip	12	12	-	-
35	UPS	6	6	-	-
36	Kursi kerja	5	5	-	-
37	Sofa	2	2	-	-
38	Gorden	1	1	-	-

### C. Isu Strategis

Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dijumpai antara lain:

#### 1. Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat.

Dalam hal penegakan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat diidentifikasi permasalahan yaitu :

- a) Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- b) Rendahnya tingkat keaktifan linmas/hansip;
- c) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19 terutama untuk memakai masker.

#### 2. Pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan.

Dalam hal pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a) Masih rendah lembaga kemasyarakatan yang berprestasi;
- b) Masih rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di desa;
- c) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten;
- d) Belum optimalnya Penyusunan APBDES;
- e) Belum semua desa yang administrasi pengelolaan keuangannya yang baik.

#### 3. Tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN.

Dalam hal tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a) Masih kurangnya jumlah personil di Kecamatan Bajuin;
- b) Masih kurangnya sarana dan prasarana kantor kecamatan Bajuin masih kurang memadai, baik berupa tata ruang gedung, ketersediaan jaringan internet dan peralatan penunjangnya;
- c) Masih kurangnya kualitas SDM yang ada masih jauh dari standar ideal aparatur pelayanan publik;
- d) Masih terbatasnya anggaran yang dikelola oleh kecamatan, sedangkan kebutuhan operasional pelayanan dan kegiatan pembangunan.

Untuk lebih jelasnya mengenai identifikasi permasalahan dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 5. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah SKPD Kecamatan Bajuin**

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat	Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Rasio Poskamling dan anggota Linmas yang belum sesuai
		Rendahnya tingkat keaktifan linmas/hansip	
		Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan untuk mengurangi penyebaran virus covid-19	Belum optimalnya edukasi terhadap masyarakat terkait protokol kesehatan untuk mencegah virus covid-19
2	Pemberdayaan dan Penguatan Kelompok rentan	Masih rendahnya lembaga kemasyarakatan yang berprestasi	Kurang aktifnya lembaga kemasyarakatan (LPMD, PKK, RT/RW, Karang Taruna, Posyandu) di desa
		Masih rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di desa	
		Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk musrenbang Kabupaten	Masih rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrenbang desa dan kecamatan
		Belum optimalnya Penyusunan APBDes	Belum optimalnya laporan keuangan desa yang tepat waktu dan sesuai standar pelaporan
		Belum semua desa yang administrasi pengelolaan keuangannya baik	
3	Tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN	Masih kurangnya jumlah personil di Kecamatan Bajuin	Belum terisinya semua Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu sesuai standar ideal dan SOTK Kecamatan yang seharusnya jumlah ASN 35 orang, namun tersedia 14 orang ASN
		Masih kurangnya sarana dan prasarana kantor kecamatan Bajuin masih kurang memadai, baik berupa tata ruang gedung, ketersediaan jaringan internet dan peralatan penunjang lainnya	Kurangannya Anggaran dan sarana prasarana penunjang operasional kegiatan
		Terbatasnya anggaran yang dikelola oleh kecamatan, sedangkan kebutuhan operasional pelayanan dan kegiatan pembangunan	
		Masih kurangnya kualitas SDM yang ada masih jauh dari standar ideal aparatur pelayanan publik	Kurangannya peluang dan kesempatan peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN

---

Berdasar identifikasi permasalahan di atas maka tantangan isu strategis yang dihadapi dari tugas dan fungsi pelayanan kecamatan sebagai berikut.

1. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan penguatan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar;
2. Isu Reformasi pelayanan publik di kecamatan (pelayanan perizinan, pelayanan kependudukan) dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan akuntabel;
3. Penguatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### **D. Produk dan Layanan**

Pelayanan yang diselenggarakan pada Kantor Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, sesuai dengan mekanisme prosedur pelayanan, di antaranya :

1. Pelayanan pembuatan IMB rumah tempat tinggal.
2. Pelayanan pembuatan Rekomendasi.
3. Pelayanan perekaman pembuatan KTP Elektronik/Manual.
4. Pelayanan pembuatan KK (Kartu Keluarga).
5. Pelayanan legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris.
6. Pelayanan legalisasi pembuatan SKCK.
7. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Usaha (SKTU).
8. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Domisili.
9. Pelayanan Surat Keterangan Pindah.
10. Pelayanan Surat Keterangan Kematian.
11. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
12. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Ijin Keramaian.
13. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Domisili.
14. Pelayanan pembuatan Surat Dispensasi Nikah.

## E. Sistematika Penyajian

Dalam pembuatan Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut untuk tahun 2020 ini, sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 065/3317/ORG tanggal 28 Desember 2022 perihal Penyampaian Laporan Kinerja (LKj) SKPD tahun 2022 sebagai berikut, yaitu :

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

- BAB I**           Pendahuluan berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.
- A. Latar Belakang
  - B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi
  - C. Isu Startegis
  - D. Produk dan Layanan
  - E. Sistematika Penyajian
- BAB II**           Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menyajikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- A. Visi RPJMD
  - B. Misi RPJMD
  - C. Tujuan dan Sasaran Strategis
  - D. Indikator Kinerja Utama
  - E. Perjanjian Kinerja
  - F. Program dan Kegiatan
- BAB III**        Akuntabilitas kinerja
- A. Capaian Kinerja Organisasi  
menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi
  - 1. Sasaran RPJMD
  - 2. Eselon III (Kepala Kantor/Camat) A
    - 1). Eselon IV (kepala Seksi) A.1
  - 3. Eselon III (sekretaris Camat) B

---

### 1). Esselon IV (Kasubbag) B.1

#### B. Akuntabilitas Keuangan

menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

1. Anggaran dan realisasi APBD 2022
2. Anggaran dan realisasi menurut sasaran dan program
3. Perbandingan Program dan kegiatan Tahun 2020 dan 2022

#### BAB IV

Penutup, menjelaskan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

- a. Kesimpulan
- b. Strategi Peningkatan Kinerja

#### LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. IKU
2. Pernyataan Hasil Reviu
3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
4. *Cascading* / Pohon Kinerja
5. Capaian Per Triwulan (1 - 4)
6. Monev Renstra
7. Matrik Keselarasan

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. VISI RPJMD

Rencana Strategis Kabupaten Tanah Laut dijabarkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019.

RPJMD Kabupaten Tanah Laut ini telah menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis SKPD untuk tahun 2018 sampai dengan 2023 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran serta target selama periode tersebut.

Visi adalah suatu gambaran jauh kedepan, kemana suatu organisasi/lembaga hendak dibawa. Pernyataan Visi Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2018-2023 adalah :

**“TANAH LAUT BERKARYA, INOVASI, TERTATA,  
RELIGIUS, AKTUAL, DAN SINERGI  
(BERINTERAKSI)”**

Kata “BERINTERAKSI” pada Visi di atas merupakan singkatan dari frasa: “Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi”. Penjabaran makna dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 adalah sebagaiberikut:

Maknanya adalah bahwa selama periode 2018-2023, para pelaku pembangunan

**Berkarya**

di Daerah Kabupaten Tanah Laut, secara bersama-sama, berkarya mewujudkan tujuan dasar dari pembangunan daerah, yaitu peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.



### Inovasi

Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang dilaksanakan seluruh perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, harus semakin ditingkatkan dalam rangka percepatan peningkatan taraf kesejahteraan rakyat. Inovasi ini berupa terobosan jenis pelayanan yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, inovasi di tingkat kelompok-kelompok masyarakat, khususnya di industri kreatif, juga harus dikembangkan sehingga lebih mampu mandiri dalam upaya peningkatan taraf kesejahteraannya.



### Tertata

Aspek administrasi dan aspek substansi diatur secara tertib dalam sebuah siklus atau proses perencanaan yang semakin berkualitas. Dengan demikian, kualitas perencanaan di perangkat daerah, terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja harus semakin ditingkatkan secara berkesinambungan.



### Relegius

Peran sektor keagamaan harus semakin ditingkatkan untuk peningkatan produktivitas aparatur dan masyarakat. Aparatur sipil di tiap perangkat daerah harus menjadi teladan dan menginspirasi upaya peningkatan produktivitas pada semua lini kehidupan kemasyarakatan.



### Aktual

Penekanan pada aspek aktual ini adalah bahwa pilihan kebijakan serta program dan kegiatan dari perangkat daerah harus relevan secara waktu, relevan secara

---

lokasi, dan relevan dengan pihak yang dilayani, yaitu masyarakat di Daerah Kabupaten Tanah Laut.



### Sinergi

Sinergi dimaksudkan untuk penguatan prinsip kegotong-royongan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Ego sektoral dan ego bidang harus dihapus dan digantikan dengan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

*Tagline* dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 adalah “**DESA DIBINA, KOTA DITATA**”. Sedangkan motto dalam pencapaiannya adalah “**KERJA KERAS, CERDAS, TUNTAS, BERKUALITAS, DAN IKHLAS**”.

Dengan demikian, fokus dari keseluruhan Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 adalah Tanah Laut yang *BERINTERAKSI* pada lokus “*DESA DIBINA, KOTA DITATA*” melalui “*KERJA KERAS, CERDAS, TUNTAS, BERKUALITAS, DAN IKHLAS*”. Fokus pada lokus “*DESA DIBINA, KOTA DITATA*” adalah karena pada hakikatnya masyarakat berdomisili di wilayah perdesaan dan perkotaan.

Kondisi yang diharapkan dari pembinaan desa dan penataan kota di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah karya nyata dalam wujud peningkatan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan di tingkat perdesaan dan perkotaan.

---

## B. Misi

Memperhatikan perubahan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan “**Tanah Laut yang BERINTERAKSI**”, maka misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023 adalah sebagai berikut:

- BERKARYA** : diwujudkan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi, yang pada gilirannya nanti meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di Daerah Kabupaten Tanah Laut
- INOVASI** : diwujudkan dengan menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif
- TERTATA** : diwujudkan dengan membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)
- RELIGIUS** : diwujudkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat
- AKTUAL dan SINERGI** : diwujudkan dengan membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

### C. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023, Kecamatan Bajuin beserta seluruh komponen organisasi berusaha untuk mewujudkan dengan menetapkan tujuan yang menjadi komitmen bersama dalam hubungannya dengan upaya perwujudan visi dan misi RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut 2018-2023.

Adapun tujuan yang telah dirumuskan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Kecamatan.
2. Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien.

Agar pelayanan dan pembinaan masyarakat dapat terselenggara dengan baik dan berhasil guna, maka sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Bajuin adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
2. Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan.
3. Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian.

Sasaran strategis yang telah dirumuskan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut sebagaimana sasaran Renstra adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel. 6 . Sasaran strategis, indikator dan target Kecamatan Bajuin Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan	88
2.	Meningkatnya implementasi Reformasi Birokasi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai RB	70
		Nilai SAKIP	82
3.	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum dan Kepegawaian	Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib	100 %
4.	Meningkatnya tata kelola perencanaan pelaporan keuangan SKPD	Persentase Pengelolaan Perencanaan Pelaporan Keuangan yang tertib dan tepat waktu	100 %

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Bajuin Tahun 2019-2023 (target 5 tahun) pada renstra disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 7. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bajuin Tahun 2019-2023**

VISI : Terwujudnya Tanah Laut yang "**BERINTERAKSI**" (*Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, Sinergi*)

N O	TUJUA N	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terwujudnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan.	IKM	Baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan (Indeks Kepuasan Masyarakat)	83	85	87	88	89
2.	Terwujudnya Implementasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Indeks RB	60	Meningkatnya implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai RB	-	60 (C)	65 (B)	70 (B)	75 (BB)
					Nilai SAKIP	72 (BB)	75 (BB)	81(A)	82(A)	83(A)
	Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien	Persentase pengelolaan administrasi perkantoran dan kepegawaian, perencanaan keuangan yang tertib	100%	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian	Persentase layanan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib	100%	100%	100%	100%	100%

#### D. Indikator Kinerja utama

Indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja, baik untuk pengelolaan maupun pengendalian kegiatan. Sehingga pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan lebih terarah dan terukur, jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Berdasarkan Formulir Tujuan, Indikator Tujuan, Target, Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Kecamatan Bajuin menentukan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dalam mengukur keberhasilan kinerja kecamatan yaitu, Tingkat Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang ada di Kecamatan.

Tingkat kepuasan masyarakat diukur berdasarkan hasil / tingkat penilaian kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan di Kecamatan Bajuin.

**Tabel 8. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bajuin Tahun 2022**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggung-Jawab
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di kecamatan	Hasil survey  ( 88 )	Semua kasi di kecamatan

---

## E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian kinerja mengandung arti bahwa instansi pemerintah harus merencanakan apa yang akan dilaksanakan (program, kegiatan) dan apa hasilnya (*outcome, output*). Perencanaan kinerja sesungguhnya tidak saja merencanakan apa yang akan dikerjakan, akan tetapi sekaligus menetapkan target (*quantitative objective*) hasil yang ingin dicapai. Oleh karena itu, perencanaan kinerja yang baik akan sangat tergantung dari pengumpulan data pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, pemetaan sumber daya/ kekuatan yang ada dan ketepatan penentuan asumsi-asumsi ataupun prognosis/ proyeksi kedepan.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Bajuin Tahun 2022 yang telah disepakati baik oleh camat, Pejabat Esselon III dan Pejabat Eselon IV, adalah sebagai berikut :

**Tabel 9. Perjanjian Kinerja Seluruh Pejabat Struktural, baik Camat, Eselon III dan Eselon IV Kecamatan Bajuin Tahun 2022.**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5
<b>Camat :</b> Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan	88	3 Program / 6 Kegiatan	Rp. 3.311.789.195
<b>Kasi Tata Pemerintahan :</b> 1. Memfasilitasi Pengelolaan administrasi Pemerintahan Desa dan BPD 2. Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemilu, Pilkada, dan Pemilihan Kepala Desa serta penjaringan aparat desa dan BPD 3. Memonitoring Penyusunan Laporan Kependudukan 4. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan	1. Jumlah desa yang mengelola administrasi pemerintahan dengan baik 2. Jumlah desa yang di fasilitasi dengan baik pada penyelenggaraan Pemilu, Pilkada, dan Pemilihan Kepala Desa serta penjaringan aparat desa dan BPD 3. Jumlah Desa yang Data Kependudukannya terverifikasi Dengan Akurat 4. Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan	9 Desa 9 Desa 9 Desa 1 Kegiatan	1 Program / 1 Kegiatan	Rp. 16.959.151

<p><b>Kasi PMD :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memfasilitasi Kelompok Masyarakat dalam Pemasaran Hasil Produksi</li> <li>2. Memberikan Pembinaan tentang Penyusunan Monografi Kecamatan serta Profil Desa yang Akurat</li> <li>3. Memfasilitasi pengelolaan Keuangan Desa</li> <li>4. Memberikan Pelayanan Administrasi Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) non Komersial</li> <li>5. Fasilitasi kegiatan Musrembang Tingkat Kecamatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah kelompok masyarakat yang berhasil memasarkan hasil produksinya</li> <li>2. Jumlah dokumen Profil Desa yang berhasil disusun dengan baik</li> <li>3. Jumlah desa yang mengelola keuangan dgn baik</li> <li>4. Jumlah pelayanan administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) non komersil sesuai SOP</li> <li>5. Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kegiatan Musrembang Tingkat Kecamatan</li> </ol>	<p>9 kelompok</p> <p>9 dokumen</p> <p>9 Desa</p> <p>10 Dokumen</p> <p>1 Kegiatan</p>	<p>1 Program / 2 Kegiatan</p>	<p>Rp. 9.900.000,-</p>
--	---	--	-----------------------------------	------------------------

1	2	3	4	5
<b>Kasi Kemasyarakatan :</b>  1. Memberikan Pembinaan Kepada Kelompok Organisasi Masyarakat di bidang Kemasyarakatan 2. Memfasilitasi Kegiatan di bidang sosial, Keagamaan, Kebudayaan dan olahraga di tingkat Kecamatan 3. Memfasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial di Kecamatan	1. Jumlah Kelompok Organisasi Masyarakat yang dibina di bidang kemasyarakatan 2. Jumlah Kegiatan di bidang Sosial, Keagamaan, Kebudayaan dan Olahraga yang sesuai SOP 3. Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang di Fasilitas Penyaluran Bantuan Sosial	1 Kelompok   4 Kegiatan   747 KK	1 Program / 1 Kegiatan	Rp. 352.080.625 ,-
<b>Kasi Trantib :</b>  1. Memfasilitasi Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan 2. Membina kelompok Masyarakat di Bidang Ketentraman dan Ketertiban 3. Monitoring Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan 4. Melakukan sosialisasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan	1. Jumlah penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat masyarakat di Kecamatan yang difasilitasi 2. Jumlah Kelompok Masyarakat di Bidang Ketentraman dan Ketertiban yang aktif 3. Jumlah Penanganan Gangguan dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan yang di monitoring 4. Jumlah Sosialisasi Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan yang di monitoring	1 Kejadian   9 Kelompok   3 Kejadian   1 Kegiatan		Rp. 0,-
<b>Kasi Pelayanan :</b>  1. Memberikan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	1. Jumlah Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SOP	15 Jenis Pelayanan		Rp 0,-

1	2	3	4	5
2. Memfasilitasi penanganan Aduan Masyarakat 3. Menyusun Data informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	2. Jumlah pengaduan masyarakat yang difasilitasi 3. Jumlah Data Informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	2 Pengaduan  1 Dokumen		
<b>Sekcam :</b>  1. Meningkatkan implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja  2. Meningkatkan kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian	1. Nilai RB Nilai SAKIP  2. Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib	65 82  100 %	1 Program / 4 Kegiatan	Rp2.932.759.419 ,-
<b>Kasubbag Umpeg :</b>  1. Memberikan Pelayanan Administrasi Perkantoran  2. Pemenuhan Sarana dan Prasanana Kantor  3. Memberikan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	1. Jumlah ASN yang administrasi perkantornya terlayani dengan baik 2. Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan Baik 3. Jumlah ASN yang administrasi kepegawaiannya terlayani dengan baik	14 orang  367 Unit  13 Orang	1 Program / 3 Kegiatan	Rp 472.528.810,-
<b>Kasubbag Perencanaan dan Keuangan :</b>  1. Menyusun Dokumen Perencanaan Kinerja dan Perencanaan Keuangan 2. Menyusun Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun sesuai ketentuan	1. Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	6 Dokumen  4 Dokumen	1 Program / 1 Kegiatan	Rp 2.460.230.609

## F. Program dan Kegiatan

**Tabel 10. Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Kecamatan Bajuin Tahun 2022**

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)	Kegiatan/Sub Keg.	Anggaran (Rp)
1.	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.055.665.739	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.550.230.609
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	180.960.575
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	229.573.511
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.901.044
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah	369.039.776	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengalaman pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negera Kesatuan Republik Indonesia	16.959.151

				Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	353.080.625
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.900.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9.900.000
<b>JUMLAH</b>			<b>3.434.695.515</b>		<b>3.434.695.515</b>

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi**

##### **1. Sasaran RPJMD**

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai dalam tahun 2022 Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja tahun 2022 ini merupakan laporan kinerja keempat Renstra 2018-2023 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, output, dan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan- tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerja, Pemerintah Kabupaten Tanah laut menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai dengan Permenpan 88 / 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi tujuh kategori sebagai berikut :

**Tabel 11. Pengelompokan Capaian Kinerja**

<b>Urutan</b>	<b>Rentang Capaian</b>	<b>Kategori Capaian</b>
I.	Lebih dari 90 %	Sangat Memuaskan
II.	Di atas 80 % sampai dengan 90 %	Memuaskan
III.	Di atas 70 % sampai dengan 80 %	Sangat Baik
IV.	Di atas 60 % sampai dengan 70 %	Baik
V.	Di atas 50 % sampai dengan 60 %	Cukup
VI.	Kurang dari >30 - 50	Kurang
VII	Kurang dari >0 - 30	Sangat Kurang

Adapun capaian kinerja Sasaran strategis Kecamatan Bajuin Tahun 2022 terhadap target sebagai berikut :

**Tabel 12. Realisasi Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kecamatan Bajuin Tahun 2022**

NO.	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan	88	<b>88,63</b>	<b>100,71%</b>

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bajuin terdiri dari 1 (satu) indikator, yaitu tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan. Berdasarkan pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) per responden dan per unsur pelayanan berupa 150 lembar kuisisioner yang dibagikan, terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang memuat unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu :

1. Persyaratan;
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan;
3. Waktu Penyelesaian;
4. Kewajaran Biaya / Tarif Pelayanan;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi /Kemampuan Pelaksana Pelayanan;
7. Perilaku Pelaksana Pelayanan;
8. Sarana dan Prasarana Pelayanan; dan
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

Dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) didapat nilai untuk IKM Tahun 2022 adalah 88,63 dari target 88, dengan nilai capaian sebesar 100,71% berdasarkan Tabel 11. tentang Pengelompokan Capaian Kinerja, IKM Kecamatan Bajuin Tahun 2022 termasuk kategori **Sangat Memuaskan**.

Nilai capaian IKU tahun 2022 (100,71 % dari target) bila dibandingkan dengan capaian IKU Tahun 2021 (96,13 % dari target) memang mengalami peningkatan sebesar 3,84 %, dan dari sudut realisasi IKM juga meningkat dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2021 realisasi IKM sebesar 83,64 (Mutu Pelayanan A) dari target 87, sementara pada Tahun 2022 realisasi IKM sebesar 88,63 (Mutu Pelayanan A) dari target 88, ada peningkatan realisasi IKM sebesar 3,55. Adapun nilai rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan yakni:

**Tabel 13. Nilai Rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 9Unsur Pelayanan Kecamatan Bajuin Tahun 2022**

No.	Unsur Pelayanan	NRR	IKM
1.	Persyaratan	3,56	A
2.	Prosedur	3.39	A
3.	Waktu Pelayanan	3.23	A
4.	Biaya / Tarif	3.98	A
5.	Produk Layanan	3.62	A
6.	Kompetensi Pelaksana	3.53	A
7.	Perilaku Pelaksana	3.23	A
8.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3.71	A
9.	Sarana dan Prasarana	3.67	A

---

Dari Tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa unsur yang memiliki Nilai Rata-rata (NRR) tertinggi adalah unsur Biaya/tarif (3,98) sedangkan unsur dengan Nilai Rata-rata(NRR) terendah adalah unsur persyaratan (3,56). Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelayanan paling tinggi diperoleh dari kejelasan biaya/tarif, sedangkan pada Persyaratan dan Kompetensi Pelaksana memberikan tingkat kepuasan paling rendah, hal ini disebabkan berkas persyaratan yang disampaikan tidak lengkap sehingga tidak bisa diselesaikan secara cepat dan tepat waktu.

Pada Tahun 2022 Kecamatan Bajuin menetapkan target nilai IKM sebesar 88, sementara berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat tahun 2022 diperoleh realisasi nilai IKM 88,53 (Mutu Pelayanan Sangat Baik) terhadap 9 (Sembilan) unsur pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa tercapainya target nilai IKM sebesar 3,55 dari target yang ditetapkan.

Kecamatan Bajuin telah berhasil dalam mencapai target IKM. Berdasarkan analisa hal ini terjadi karena telah ditingkatnya pemenuhan sarana prasarana penunjang pelaksanaan pelayanan terutama jaringan internet dan penambahan pelayan via online melalui aplikasi whatsapp. Sehingga penyampaian informasi persyaratan baik dari dinas/instansi pemangku ke Pelayanan di kecamatan sampai pada petugas di desa tersampaikan dengan baik/tepat waktu.

Sehingga pelayanan di kecamatan Bajuin, terutama untuk pembuatan kartu keluarga (KK) dan pembuatan E-KTP bisa langsung dilayani di kantor kecamatan Bajuin. Ini menyebabkan pelayanan terhadap masyarakat selaku pemohon telah mendapatkan pelayanan dengan maksimal, dalam semua pembuatan E KTP dan kartu keluarga (KK) yang di berikan langsung di kecamatan Bajuin. Dan untuk mempertahankan pelayanan agar terus tercapai target IKM perlu memberikan penghargaan terhadap petugas yang berprestasi dan terus memotivasi untuk mendapatkan prestasi di masa yang akan datang serta mempertimbangkan kesejahteraan petugas pelayanan.

---

Pada Tahun 2022 (Tahun Ke-4) pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2018-2023, Kecamatan Bajuin menetapkan 2(dua) tujuan yang ingin dicapai. Tujuan pertama meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Kecamatan dengan menetapkan 1 (satu) sasaran strategis yaitu ***Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan Indikator tingkat kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan.***

Aktualisasi ketentuan yang telah disepakati pihak terkait dan telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagai pedoman, pegangan, petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur Pemerintah dan masyarakat untuk memperlancar dan memadukan setiap usaha untuk mencapai tujuan, sasaran serta visi dan misi yang telah diuraikan sebelumnya dituangkan dalam bentuk kebijakan, dengan demikian maka arah makro kebijakan Kecamatan Bajuin adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan efektif, efisien, akuntabel dan transparan dalam upaya meningkatkan kapasitas pelayanan.
2. Kebijakan mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, professional dan daya saing.

Kebijakan mengembangkan perekonomian desa yang berdaya saing dalam menunjang penciptaan lapangan kerja dan pelayanan public serta meningkatkan peranan swasta dalam pembangunan ekonomi di pedesaan.

Adapun tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sesuai dengan Visi "*Terwujudnya Tanah Laut yang Berinteraksi, Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual ,Sinergi*" dan Misi "*Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya dan pelayanan masyarakat berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya*" dituangkan dalam tabel 14 berikut :

**Tabel 14. Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Bajuin**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Keamanan dan Ketertiban serta Pelayanan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1). Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait.</li> <li>2). memperkuat pemahaman aparat akan tugas pokok dan fungsi.</li> <li>3). Memberdayakan aparat kecamatan Desa/Kelurahan.</li> <li>4). Menyederhanakan dan mempercepat sistem pelayanan kepada masyarakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1). Melakukan koordinasi yang intensif.</li> <li>2). Mengikuti sertakan aparatur dalam diklat-diklat.</li> <li>3). Memberikan pemahaman kepada aparat desa mengenai tupoksinya baik melalui arahan ataupun diklat formal/non formal.</li> <li>4). Melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat dalam meningkatkan pelayanan yang baik.</li> </ol>
Meningkatkan tata kelola administrasi perkantoran Kecamatan Bajuin yang akuntabel.	Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran Kecamatan Bajuin yang akuntabel.	Meningkatkan program dan kegiatan tata kelola administrasi perkantoran.	Melaksanakan program dan kegiatan tata kelola administrasi perkantoran.

## 2. Eselon III (Camat)

Adapun Realisasi target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bajuin Tahun 2022 mencapai 100,71% dari target sebesar 88 dengan point realisasi IKM 88,63. Lebih Jelasnya dapat dilihat pada tabel 15 berikut.

**Tabel 15. Realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bajuin Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan	88	88,63	100,71%

Adapun realisasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di kecamatan Bajuin dari tahun 2019-2022 terjadi peningkatan seiring bertambahnya sarana prasarana menunjang kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 16 berikut:

**Tabel 16. Realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bajuin Tahun 2019-2022 dan Target Akhir Tahun Renstra (2023)**

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022					Capaian 2022 target akhir renstra
		2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan	81,34	83,64	88	88,63	100,71%	99,58%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

### 1) Perbandingan Realisasi dengan Target;

Pencapaian realisasi dari target tahun 2022 sebesar 100,71% terjadi peningkatan realisasi nilai IKM dari 2020 ke 2022, persentase capaian juga meningkat dan hasil capaian tahun 2022 terhadap target akhir tahun Renstra (2023) adalah 99,58 persen. Peningkatan ini tercapai karena adanya hubungan dan koordinasi yang cukup baik antara dinas/instansi terkait dengan Kecamatan Bajuin. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang cukup besar mempengaruhi peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

## 2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

- a. Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 terjadi peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari 83,64 menjadi 88,64;
- b. Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 sebesar 100,71% dibandingkan tahun 2021 sebesar 96,13% terjadi peningkatan.
- c. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis kecamatan Bajuin tahun 2023 sebesar 89, maka realisasi 2022 sudah mencapai 99,58% dari target;

## 3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Pelayanan terhadap masyarakat/publik terkait pelayanan umum tahun 2022 dibandingkan tahun 2020 terjadi kenaikan penilaian. Kenaikan penilaian terutama pada unsur biaya/tarif pelayanan hal ini dikarenakan tidak adanya tarif/biaya dalam pelayanan, bahkan tidak ada pungutan liar dari petugas dalam proses pelayanan sehingga tingkat kepuasan paling tinggi berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat adalah unsur Biaya/Tarif.

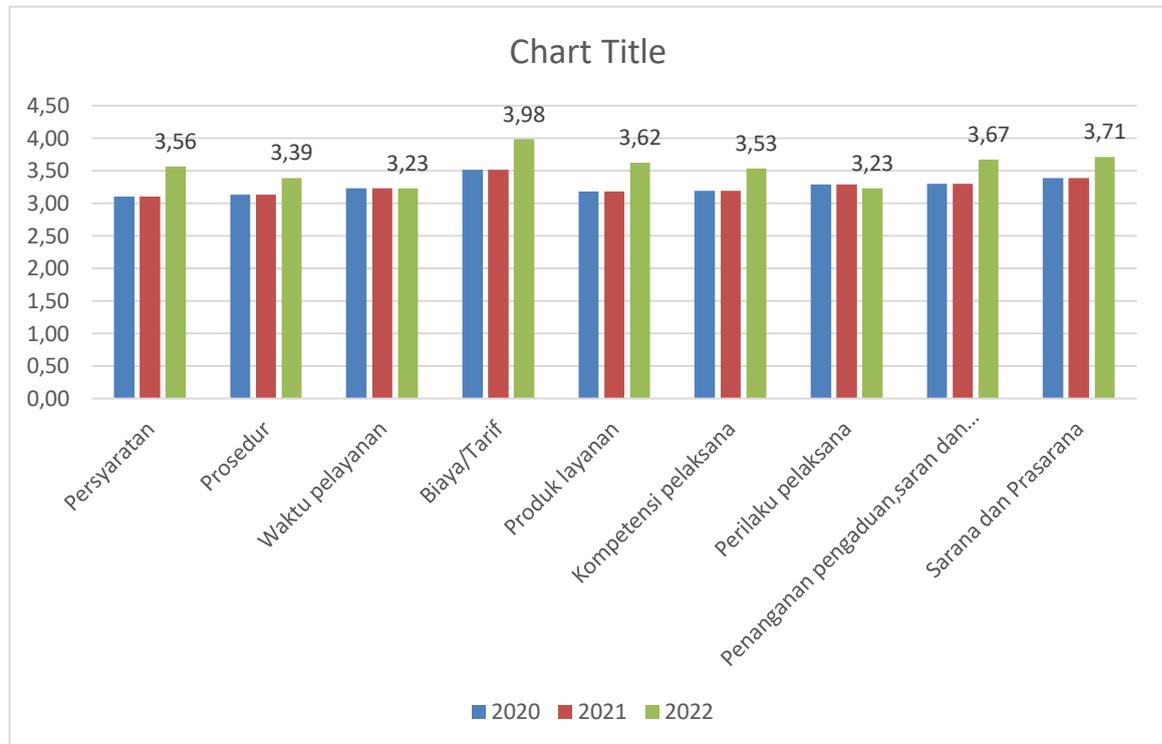
Terjadinya peningkatan nilai IKM tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 di tunjang dari kesiapan pelayanan publik di Kecamatan Bajuin. Baik dari kesiapan sumberdaya manusia, sarana prasarana penunjang dan jaringan internet setiap tahunnya mengalami peningkatan. Walaupun demikian sangat diharapkan kinerja pelayanan harus mengalami peningkatan setiap tahunnya demi mencapai pelayanan prima.

Ketentuan biaya tarif layanan dihapuskan / gratis pada beberapa pelayanan seperti pengolahan KTP, KK, Akte kelahiran, Kartu Identitas Anak dan lain-lain menyebabkan salah satu unsur yang paling tinggi tingkat kepuasan masyarakat di tahun 2022.

Nilai terendah ada pada unsur persyaratan dan kompetensi pelaksana. ini disebabkan berkas persyaratan yang disampaikan tidak lengkap sehingga tidak bisa diselesaikan secara cepat dan tepat waktu.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar grafik 2 mengenai Nilai rata-rata unsur pelayanan pada kecamatan Bajuin tahun 2020 – 2022 berikut ini.

**Grafik 1. Nilai Rata-Rata (NRR) Unsur-Unsur Pelayanan Kecamatan Bajuin Tahun 2020-2022**



#### 4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Dalam mencapai sasaran meningkatnya Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di kecamatan, Kecamatan Bajuin di dukung oleh Program / kegiatan penunjang dengan pagu Rp. 3.434.695.515.-. dan realisasi sebesar Rp. 2.869.535.715.- atau 83,55%.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 17 berikut ;

**Tabel 17. Realisasi Program Penunjang pada Kecamatan Bajuin Tahun Anggaran 2022**

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	3.055.651.394.-	2.590.945.965.-
2.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	369.039.776.-	268.599.750.-
3.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.900.000,-	9.900.000-
<b>JUMLAH</b>		<b>3.434.681.170-</b>	<b>2.869.535.715.-</b>

#### 5). Analisis Efisiensi Penggunaan SDM Jumlah ASN dan PTT

Dalam menjalankan kegiatan pada kantor Kecamatan Bajuin dibantu oleh 14 orang ASN dan 8 PTT

#### 6). Kendala dan Perbaikan Kedepannya

- Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

Nilai Sakip dengan target 82 dengan realisasi 76,80 dengan presentase 93,65 % dan kendala yang dihadapi yaitu kurang berperannya para Kasi dalam mendokumentasikan setiap kegiatan.

- Adapun solusi untuk memecahkan kendala yang dikemukakan diatas yaitu :

a. Para kasi dan kasubbag lingkup Kecamatan Bajuin diarahkan untuk melaksanakan kegiatan dengan membuat laporan kegiatan, melengkapi foto dan video kegiatan serta menyimpan dalam 1 (satu) folder tersendiri di PC atau laptop.

b. Mengintensifkan kegiatan rapat staf dalam rangka pemberian arahan kegiatan sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai.

- Adapun rencana aksi untuk meningkatkan nilai sakiip yaitu :
  - a. Mengefektifkan penggunaan media sosial resmi kecamatan dalam rangka transparansi publik, menambah platform media sosial berupa instagram, mengupdate kembali konten berita kegiatan pada website kecamatan.

### 3. Eselon III (Sekretaris)

Adapun Realisasi target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Kecamatan Bajuin Tahun 2022 adalah 100,055%. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 18 berikut.

**Tabel 18. Sasaran Strategis, indikator, target, realisasi dan capaian Sekretariat Kecamatan Bajuin Tahun 2022**

NO.	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai RB	70	74,60	106,57 %
		Nilai SAKIP	82	76,80	93,65 %
2.	Meningkatkan kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian	Persentase Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib	100 %	100%	100%
3	Meningkatnya tata kelola perencanaan pelaporan keuangan SKPD	Persentase Pengelolaan Perencanaan Pelaporan Keuangan yang tertib dan tepat waktu	100 %	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja					100,005%

Adapun realisasi capaian target terhadap peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja (Nilai RB dan Nilai SAKIP) dan peningkatan kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian (Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib) yang ada di kecamatan Bajuin dari tahun 2020-2022 terjadi peningkatan seiring bertambahnya sarana prasarana menunjang kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 19 berikut:

**Tabel 19. Realisasi, Target dan Persentase Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Kecamatan Bajuin**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	% Capaian
1	Nilai RB	11,16	47,13	70	74,60	106,57%
	Nilai SAKIP	81,38	76,80	82	76,80	93,65%
2	Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Pengelolaan Perencanaan Pelaporan Keuangan yang tertib dan tepat waktu			100%	100%	100%

**Tabel 20. Realisasi Nilai RB dan Nilai SAKIP Kecamatan Bajuin Tahun 2020-2022 berdasarkan komponen penilaian**

No	Komponen Penilaian Reformasi Birokrasi	Nilai			Ket.
		2020	2021	2022	
1.	Manajemen Perubahan	30,50	36,11	100	
2.	Deregulasi Kebijakan	75,00	50,00	100	
3.	Penataan Organisasi	20,00	75,00	50	
4.	Penataan Tata Laksana	39,00	46,69	78,67	
5.	Penataan Manajemen SDM	0,00	51,25	50	
6.	Penguatan Akuntabilitas	0,00	61,33	86,67	
7.	Penguatan Pengawasan	0,91	36,71	100	
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	0,00	36,03	70,93	
<b>Jumlah</b>		<b>11,16</b>	<b>47,13</b>	<b>74,60</b>	

No	Komponen Penilaian SAKIP	Nilai			Ket.
		2020	2021	2022	
1.	perencanaan kinerja	28,3	28,95	24,99	
2.	pengukuran kinerja	19,38	22,19	23,10	
3.	pelaporan kinerja	10,15	10,88	10,50	
4.	evaluasi internal	6,55	3,04	18,33	
5.	pencapaian kinerja	17	11,75		
<b>Jumlah</b>		<b>81,38</b>		<b>76,80</b>	

**Sumber data : Rekap Hasil Evaluasi Nilai RB dan Nilai SAKIP Kab. Tanah Laut Tahun 2020 -2022**

Indikator kinerja Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib di lingkungan Kecamatan Bajuin dapat terpenuhi seluruh target (100%) baik dalam hal keperluan kepegawaian dan administrasi umum.

### 1) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

- a. Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2022 untuk Indikator kinerja Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib sama 100%, Realisasi Indikator nilai RB tahun 2021 adalah 47,13 sedangkan tahun 2022 sebesar 74,60 sedangkan Realisasi Indikator Nilai SAKIP tahun 2021 sebesar 76,8 sedangkan tahun 2022 sebesar 76,80 .
- b. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis tahun 2023 Yaitu untuk RB 99,46% Untuk Sakip 92,53% Persentase Jumlah 100% Persentase Perencanaan 100%

**Tabel 21. Realisasi Capaian SAKIP Kecamatan Bajuin Tahun 2020 Dan Persentase Capaian Kinerja Terhadap Target SAKIP Tahun 2022.**

No.	Jenis Data	Satuan	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	
				Target	Realisasi	Terhadap Target Tahun 2022	Terhadap Target Tahun 2023
1.	RB	Nilai	47,13	70,00	47,13	106,57	99,46
	SAKIP	Nilai	76,8	82,00	76,80	93,65	92,53
2.	Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib	%	100	100	100	100	100
3.	Persentase Pengelolaan Perencanaan Pelaporan Keuangan yang tertib dan tepat waktu	%	100	100	100	100	100

### 2) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Realisasi dan capaian kinerja di sekretariat setiap tahunnya meningkat dapat dilihat dari realisasi program kegiatan penunjang dan nilai SAKIP kecamatan Bajuin. Hal ini ditunjang Sumberdaya Manusia yang ada, koordinasi yang baik dan sarana penunjang yang cukup lengkap dan terfasilitasi dengan baik sehingga realisasi capaian kinerja meningkat

### 3) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Dalam mencapai sasaran meningkatnya Nilai SAKIP dan Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib Kantor Kecamatan Bajuin di dukung oleh Program/kegiatan penunjang dengan pagu Rp. 630.270.538.-. dan realisasi sebesar Rp.542.569.134.- atau 86,08 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 22 berikut ;

**Tabel 22. Realisasi Program Penunjang pada Kecamatan Bajuin Tahun Anggaran 2022**

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	630.270.538.-	542.569.134.-

### 4) Analisi Efisiensi Pengguna SDM

Dalam menjalankan kegiatan pada bagian sekretariat, Kecamatan Bajun dibantu oleh 6 orang ASN dan 1 PTT

### 5) Kendala dan Perbaikan kedepannya

- Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :
  - a. Kurangnya tenaga ASN yang menangani kearsipan dokumen dengan kualifikasi golongan II jabatan fungsional arsiparis.
  - b. Kurangnya kendaraan dinas operasional yang menunjang kegiatan dalam pembinaan, pemberdayaan kelurahan dan desa untuk sosialisasi dan edukasi sesuai tupoksi seksi masing-masing.
  - c. Kurangnya mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis bagi staf untuk penyusunan Laporan Perencanaan SKPD, Laporan Keuangan SKPD (Bulanan, Triwulanan, Semester, Tahunan), serta Laporan Kinerja SKPD.
- Adapun solusi untuk memecahkan kendala yang dikemukakan diatas yaitu :
  - a. Melakukan usulan kebutuhan ASN yang menangani masalah kearsipan lingkup kecamatan Bajuin sehingga tata kelola kearsipan menjadi efektif dan tepat sasaran.
  - b. Melakukan usulan pelatihan dan bimbingan teknis bagi staf ASN Kecamatan Bajuin dalam rangka penyusunan Laporan Perencanaan SKPD, Laporan Keuangan SKPD, Laporan Kinerja SKPD sehingga tahapan penyusunan perencanaan daerah,

penyusunan anggaran daerah dan penatusahaan keuangan, penyusunan laporan keuangan SKPD sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah dan standar akuntansi pemerintahan.

- c. Melakukan usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) untuk kendaraan operasional Tahun 2022 Kecamatan Bajuin.
- Adapun rencana aksi untuk meningkatkan nilai sakisip yaitu :
- Pendekatan dan pengawalan terhadap usulan yang diajukan melalui SKPD yang membidangi kepegawaian, perencanaan anggaran dengan Tim anggaran Pemerintah Daerah serta Badan Anggaran DPRD.

#### **4. Eselon IV (Kepala Subbagian/Seksi)**

Kecamatan Bajuin sudah melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN), dengan di dukung oleh Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh seksi-seksi yang ada di Kantor Kecamatan Bajuin. Ada 6 (enam) Program dan 11 (sebelas) Kegiatan yang mendukung pelaksanaan pencapaian sasaran strategis pertama Kecamatan Bajuin. Adapun Target, realisasi dan capaian Kinerja kepala subbagian dan Kepala Seksi lingkup kecamatan Bajuin sebagai berikut:

## 1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Realisasi capaian kinerja Kasi Tata Pemerintahan kecamatan Bajuin terhadap target mencapai 100% . Terasilitasinya semua desa baik dalam mengelola administrasi pemerintahan desa dan BPD melalui pembinaan terkait tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Pemerintahan di Desa serta penyampaian regulasi peraturan perundang-undangan terkait kegiatan Kasi Pemerintahan Desa bersama dinas/instansi yang berwenang.

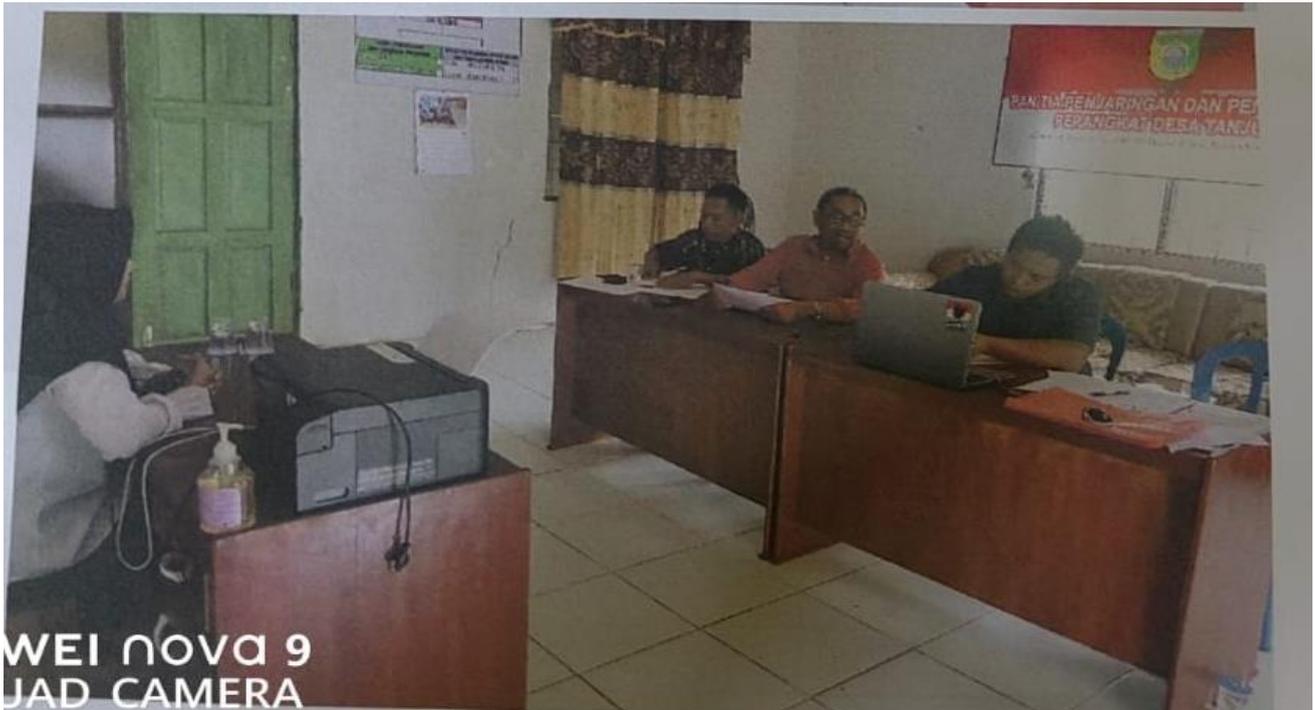
Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan melalui pelaksanaan Upacara HUT RI ke-75 yang dilaksanakan di Halaman Kantor Kecamatan Bajuin dengan menerapkan protokol kesehatan COVID19 yang dilanjutkan dengan mengikuti pelaksanaan Upacara di tingkat Kabupaten secara virtual, realisasi anggaran kegiatan tersebut Rp. 16.254.000, sebesar 95,84 % dari Rp. 16.959.151.

Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan penjaringan aparat desa dan BPD selama tahun 2022 telah terlaksana di 9 (sembilan) desa. Adapun rincian pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelantikan PAW anggota BPD desa Ketapang tanggal 27 Oktober 2022.
2. Penjaringan Anggota BPD dilaksanakan secara serentak di desa Tanjung, Ketapang, Sungai Bakar, dan Galam di lingkup kecamatan Bajuin.
3. Penjaringan Kepala Dusun 3 Tanjung di lingkup kecamatan Bajuin



**Gambar 3. Pelantikan PAW anggota BPD desa Ketapang**



**Gambar 4. Penjaringan Kepala Dusun 3 Tanjung di lingkup kecamatan Bajuin**



**Gambar 5. Penjaringan Anggota BPD dilaksanakan di desa Tanjung**



**Gambar 6. Pelaksanaan HUT RI 17 Agustus 2022 di Kantor Kecamatan Bajuin, dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan.**

## Realisasi Target Sasaran, indikator Program dan Kegiatan Seksi Tata Pemerintahan TA.2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2021	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2022 TERHADAP TARGET TARGET RENSTRA
	Memfasilitasi Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa dan BPD	Jumlah desa yang mengelola administrasi pemerintahan dengan baik	9 Desa	9 Desa	9 Desa	100%	100%
	Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu, Pilkada, dan Pemilihan Kepala Desa serta Penjaringan Aparat Desa dan BPD	Jumlah desa yang difasilitasi dengan baik pada penyelenggaraan Pemilu, Pilkada, dan Pemilihan Kepala Desa serta penjaringan aparat desa dan BPD	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	100%
	Memonitoring Penyusunan Laporan Kependudukan	Jumlah Desa yang Data Kependudukannya terverifikasi Dengan Akurat	9 Desa	9 Desa	9 Desa	100%	100%
	Fasilitasi pelaksanaan Kegiatan Kepemimpinan	Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	100%

### 1). Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan nya sama dengan tahun sebelumnya 100%

### 2). Perbandingan Realisasi dengan Target Akhir Renstra

Terealisasi nya 100%

### 3). Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia dan Program Kegiatan Pagu Anggaran ( Realisasi)

Untuk Menunjang Kinerja Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Terdapat 1 ASN

NO	Program	Pagu	Realisasi
1.	PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	RP. 16.959.151	Rp. 16.254.000

### 4). Kendala dan Rencana Aksinya

Kurangnya pemahaman Perangkat Desa Terhadap Regulasi Peraturan dan Rencana Aksinya Perlu Peningkatan Jumlah Kegiatan Sosialisasi Bagi Perangkat Desa Terhadap aturan dan Per undang- undangan dari SKPD teknis

---

## 2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi capaian kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa kecamatan Bajuin terhadap target mencapai 100% kecuali realisasi capaian jumlah pelayanan administrasi Izin mendirikan Bangunan (IMB) non komersil sesuai SOP mencapai 0 dokumen atau 0% dari target 0 Dokumen dan realisasi fasilitasi kelompok masyarakat dalam pemasaran hasil produksi terealisasi 1 kegiatan (100%) . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 24 berikut

Pelaksanaan fasilitasi pemasaran hasil produksi direncanakan pada Pameran Pembangunan pada hari Jadi Kabupaten Tanah Laut ke-57. Kegiatan promosi kelompok “Berkah” Desa Bajuin yang bergerak dalam usaha pembuatan kain sasirangan tetap berjalan sampai dengan sekarang. Promosi dan penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen. Penjualan langsung merupakan hasil dari promosi langsung yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli.

Kegiatan promosi “BUMDES Desa Tirtajaya” pemasaran produksi Jahe Instan mulai produksi dan promosi langsung kepada konsumen, begitu juga kegiatan pemasaran produksi Jahe Instan dan usaha pembuatan kain sasirangan Desa Kunyit sudah produksi dan promosi langsung kepada konsumen.

Pembinaan tentang Penyusunan Monografi Kecamatan serta Profil Desa dilaksanakan pada 9 (sembilan) desa. Kegiatan monografi kecamatan dan profil desa di bawah koordinasi Dinas PMD Kabupaten Tanah Laut. Pelaksanaan kegiatan penyusunan monografi kecamatan dan profil desa berjalan dengan baik.



**Gambar 7. Fasilitasi pemasaran hasil produksi, Pameran Pembangunan pada hari Jadi Kabupaten Tanah Laut ke-57 Kecamatan Bajuin**



**Gambar 7. Evaluasi Perubahan APBDDes Tahun Anggaran 2022 Desa se Kecamatan Bajuin yang difasilitasi oleh Tim APBDDes Kecamatan Bajuin**



**Gambar 8. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa se Kecamatan Bajuin dari Dinas PMD. Kab. Tanah Laut beserta Tim Pendamping Desa dan Kejaksaan RI**

Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2022, yaitu kegiatan Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Untuk pelaksanaan kegiatan ini sudah dilaksanakan Evaluasi APBDesa untuk 9 (sembilan) desa yang ada di Kecamatan Bajuin dengan Persentase capaian kegiatan sebesar 100 %.

Untuk Meningkatkan wawasan pengelola keuangan desa terutama Bendahara Desa dalam hal perpajakan telah dilaksanakan edukasi perpajakan bagi bendahara desa se-Kecamatan Bajuin yang difasilitasi oleh kecamatan Bajuin bersama KP2KP Pelaihari yang dilaksanakan di Aula kecamatan Bajuin. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan desa se- kecamatan Bajuin bersama Dinas PMD Kabupaten tanah Laut dan Kejaksaan RI.

Pelaksanaan Musrenbang desa dilakukan oleh 9 desa yang ada dilingkup kecamatan Bajuin dan dilanjutkan dengan Pra Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kecamatan dengan menghadirkan utusan desa, Pendamping Desa dan kecamatan serta instansi terkait.



**Gambar 9. Pelaksanaan Musrenbang Desa Bajuin Kecamatan Bajuin dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2022**

**Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2021	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2022 TERHADAP TARGET TARGET RENSTRA
	Memfasilitasi Kelompok Masyarakat dalam Pemasaran Hasil Produksi	Jumlah kelompok masyarakat yang berhasil memasarkan hasil produksinya	3 Kelompok	9 Kelompok	9 Kelompok	100%	100%
	Memberikan Pembinaan tentang Penyusunan Monografi Kecamatan serta Profil Desa yang Akurat	Jumlah Desa yang berhasil menyusun profil desa dengan baik	9 Desa	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	100%
	Memfasilitasi pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang mengelola keuangan dengan baik	9 Desa	9 Desa	9 Desa	100%	100%
	Memberikan Pelayanan Administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) non Komersial	Jumlah pelayanan administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) non komersil sesuai SOP	10 Dokumen	10 Dokumen	0 Dokumen	0%	100%
	Fasilitasi kegiatan Musrembang Tingkat Kecamatan	Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kegiatan Musrembang Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	100%

**1.). Perbandingkan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya**

Perbandingan nya sama dengan tahun sebelumnya 100%

**2). Perbandingkan Realisasi dengan Target Akhir Renstra**

Terealisasi nya 100%

---

### 3). Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia dan Program Kegiatan Pagu Anggaran ( Realisasi)

Untuk Menunjang Kinerja Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa ,Terdapat 1 ASN dan 1 PTT

NO	Program	Pagu	Realisasi
1.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	RP. 9.990.000	RP. 9.990.000

### 4). Kendala dan Rencana Aksinya

Tidak Ada Kendala dalam Kegiatan

### 3. Kepala Seksi Kemasyarakatan

**Tabel 25. Realisasi Target Sasaran, indikator Program dan Kegiatan Seksi Kemasyarakatan Ta. 2022**

Kegiatan pembinaan kelompok organisasi masyarakat di bidang kemasyarakatan di kecamatan Bajuin yaitu Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kecamatan Bajuin. Fasilitasi dan pembinaan terutama dalam dalam rangka mempersiapkan kontingen Kecamatan Bajuin untuk lomba MTQ tingkat Kabupaten Tanah Laut yang dilaksanakan pada 15 -17 Juli Tahun 2022 di Kecamatan Bati Bati.

Fasilitasi kegiatan dibidang sosial keagamaan, kebudayaan dan olahraga di tingkat kecamatan yang di targetkan 4 kegiatan dan hanya terlaksana 3 kegiatan sehingga mencapai 75%, 3 kegiatan tersebut yaitu :

Fasilitasi penyaluran bantuan sosial di kecamatan bajuin melampaui target 747 KK menjadi 3.678KK. Adapun rincian bantuan sosial yang sudah dilaksanakan dapat dilihat pada tabel 26 berikut :

**Tabel 26. Jenis Bantuan Sosial dan Jumlah Penerima Bantuan Kecamatan Bajuin Ta. 2022**

No.	Jenis Bantuan Sosial	Jumlah Penerima
1.	BLT DD	818
2.	BPNT	710
3.	BLT BBM DINSOS	710
4.	PKH	261
5.	BLT Infasi Dinsos	590
6.	BLT Inflasi Diskopdag	537
7.	Bantuan Sembako Atensi Lansia	50
8.	Bantuan Tonglat Desabilitas / Netra	1
<b>JUMLAH</b>		<b>3.678 KK</b>

*Sumberdata : Laporan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Bajuin Tahun 2022*

Penyaluran bantuan sosial dilaksanakan di kantor kecamatan, kantor desa dan ada yang melalui perbankan seperti BRI dan ada juga melalui Kantor POS Indonesia. Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD diserahkan secara simbolis oleh Bapak Bupati H. Sukamta diwakilkan kepada Pejabat di Kecamatan Bajuin untuk 3 (tiga) desa di kecamatan Bajuin yaitu desa Bajuin, desa Ketapang dan Desa Tirtajaya.



**Gambar 11. Penyerahan Simbolis BLT Dana Desa Galam**



**Gambar 12. Penyaluran BLT Dana Desa Tirtajaya**



Gambar 12. Penyaluran BLT Dana Desa Ketapang



**Gambar 13. Pelepasan Kafillah Kecamatan Bajuin untuk lomba MTQ tingkat Kabupaten Tanah Laut**

**Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Seksi Kemasyarakatan**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2021	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2022 TERHADAP TARGET TARGET RENSTRA
	Memberikan Pembinaan kepada Kelompok Organisasi Masyarakat dibidang Kemasyarakatan	Jumlah kelompok organisasi masyarakat yang dibina di bidang kemasyarakatan	1 Kelompok	1 Kelompok	1 Kelompok	100%	100%
	Memfasilitasi Kegiatan di bidang Sosial, Keagamaan, Kebudayaan, dan Olah Raga	Jumlah kegiatan dibidang sosial, keagamaan, kebudayaan dan olah raga yang sesia SOP	6 kegiatan	4 kegiatan	3 kegiatan	75%	100%
	Memfasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial di Kecamatan	Jumlah masyarakat tidak mampu yang difasilitasi penyaluran Bantuan Sosial	2,317	747 KK	1,177 KK	157,56%	100%

**1). Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya**

Pada tahun 2021 semua kegiatan sesuai dalam perencanaan dapat di akomodir , sedangkan pada tahun 2022 dalam perencanaan tidak dapat di akomodir khususnya kegiatan MTQ ke 44 Tingkat Kabupaten di Kecamatan Bati-Bati dan kegiatan Safari Ramadhan tidak sesuai dengan perencanaan di karenakan dana APBD TA 2022 tertumpu dalam kegiatan penanggulangan COVID 19.

**2). Perbandingan Realisasi dengan Target Akhir Renstra**

Kegiatan dari seksi kemasyarakatan sesuai RKA - SKPD Kecamatan Bajuin TA 2022 dapat dilaksanakan sesuai dengan pagu yang disediakan, hanya salah kegiatan yaitu Hibah kegiatan kemasyarakatan dari 4 ( empat ) proposal yang sudah di setujuji Bapak Bupati satu kelompok organisasi mengundurkan dari kegiatan tersebut yaitu organisasi pengurus group Habsyi " An-Nur " pada tahun yang sama tahun 2022 meraka menerima hibah dari kesra yaitu Hibah Fisik jadi realisasi fisik hanya 75 % pelaksanaan Hibah Kegiatan yang terliasi.

**3). Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia**

Untuk Menunjang Kinerja Kepala Seksi Kemasyarakatan ,Terdapat 2 ASN dan Dari anggaran yang ada di seksi kemasyarakatan cukup banyak tidak seimbang dengan ketenagaan yang ada , kebetulan dari seksi kemasyarakatan mempunyai satu staf tetapi tidak dapat di berdayakan karena kemampuan teknologi komputer tidak mampu dan faktor usia saat menjelang pensiun

NO	Program	Pagu	Realisasi
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	RP. 352.080.625	RP. 252.345.750

#### **4). Kendala dan Rencana Aksinya**

Perlu ditambah tenaga satu orang yang mampu membantu melaksanakan kegiatan di seksi kemasyarakatan khususnya yang mengoperasikan komputer dan mau bekerja sama

#### 4. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Pembinaan kelompok masyarakat dibidang ketenteraman dan ketertiban yang aktif melalui kelompok perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ada di 9 (sembilan) desa yang ada di kecamatan Bajuin.

Jumlah Penanganan Gangguan dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan yang di monitoring selama tahun 2022 terealisasi 3 penanganan yaitu;

1. Patroli bersama dengan Satpol PP, Polsek dan Danramil kecamatan Bajuin tentang penerapan protokol kesehatan COVID-19 ke tempat kerumunan masyarakat desa seperti warung, poskamling dan pasar. Menegur dan membubarkan kerumunan serta mensosialisasikan prokes COVID 19 dan membagikan Masker kepada warga yang kedapatan tidak menggunakan masker.
2. Memfasilitasi permasalahan pendistribusian LPG 3 kg.
3. Memfasilitasi pengaduan masyarakat Desa Tebing Siring terkait pembebasan lahan yang semula merupakan kawasan hutan lindung kemudian diberikan kepada masyarakat.

Untuk terciptanya ASN Kecamatan Bajuin bebas dari narkoba dan menambah wawasan masyarakat Kecamatan Bajuin tentang bahaya narkoba, Kecamatan Bajuin melaksanakan kegiatan Tes Urine bersama BNN Tanah Laut, pada tanggal 28 Agustus 2022 dengan peserta seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi Dan Pejabat Pengawas .



**Gambar 14. Tes Urine Deteksi Dini Narkoba Bagi ASN tanggal 28 Agustus 2022**

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Kecamatan Bajuin melalui kasi trantib memfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Konflik Bagi Kepala Desa, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat Se Kecamatan Bajuin Tahun 2022 Kabupaten Tanah Laut bertempat di aula Kecamatan Bajuin di hadiri oleh Kepala Desa, pemuka atau tokoh agama yang ada di kecamatan Bajuin.



**Gambar 15 .Kegiatan Orientasi Manajemen Konflik Bagi Kepala Desa,Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat se Kecamatan Bajuin Di Aula Kantor Kecamatan Bajuin Tahun 2022**

**Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2021	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2022 TERHADAP TARGET TARGET RENSTRA
	Memfasilitasi Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan	Jumlah penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan yang difasilitasi	1 Kejadian	1 Kejadian	1 Kejadian	100%	100%
	Membina kelompok Masyarakat di Bidang Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Kelompok Masyarakat di Bidang Ketentraman dan Ketertiban yang aktif	9 Kelompok	9 Kelompok	9 Kelompok	100%	100%
	Monitoring Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Penanganan Gangguan dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan yang di monitoring	3 Kejadian	3 Kejadian	3 Kejadian	100%	100%
	Melakukan sosialisasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan	Jumlah Sosialisasi Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan yang di monitoring	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	100%

**1.). Perbandingkan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya**

Perbandingannya sama dengan tahun sebelumnya 100%

**2). Perbandingkan Realisasi dengan Target Akhir Renstra**

Terealisasi nya 100%

### 3). Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia dan Program Kegiatan Pagu Anggaran ( Realisasi)

Untuk Menunjang Kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban ,Terdapat 1 ASN dan Pada Tahun 2022 efisiensi kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan dana makmin yang ada di sekretariat, sehubungan tidak dianggarkan pada DPA(pagu anggaran terbatas)

NO	Program	Pagu	Realisasi
1.	Kegiatan Orientasi Manajemen Konflik Bagi Kepala Desa,Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat se Kecamatan Bajuin Di Aula Kantor Kecamatan Bajuin Tahun 2022	-	-

### 4). Kendala dan Rencana Aksinya

Tidak ada Kendala dalam Kegiatan

---

## 5. Kepala Seksi Pelayanan

Pencapaian Sasaran strategis Kasi Pelayanan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran strategis Kecamatan Bajuin Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah melakukan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dimana hasil dari pelaksanaan SKM ini adalah untuk mengukur keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bajuin Tahun 2022 yakni nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dimana Kecamatan Bajuin pada Tahun 2022 memperoleh IKM sebesar 88,63 dengan mutu pelayanan ber kategori Sangat Baik.

Memberikan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada tahun 2020 sebanyak 15 Jenis Produk Pelayanan dapat terealisasi sepenuhnya (100%).Adapun jenis pelayanan yang dimaksud sebagai berikut :

1. Pelayanan pembuatan Rekomendasi.
2. Pelayanan pengambilan KTP Elektronik/Manual.
3. Pelayanan pengambilan KK (Kartu Keluarga)
4. Pelayanan pengambilan kartu identitas anak (KIA).
5. Pelayanan legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris.
6. Pelayanan legalisasi pembuatan SKCK.
7. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Usaha (SKTU).
8. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Domisili.

9. Pelayanan Surat Keterangan Pindah.
10. Pelayanan Surat Keterangan Kematian.
11. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
12. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Ijin Keramaian.
13. Pelayanan pembuatan Surat Dispensasi Nikah
14. Pelayanan Akta Kelahiran
15. Pelayanan Surat keterangan lain-lain.

PATEN telah menerapkan sistem pelayanan 1 (satu) pintu dimana Seksi Pelayanan menjadi pintu utama pendistribusian segala jenis administrasi pelayanan dan administrasi perkantoran di Kantor Kecamatan Bajuin.

Jumlah Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SOP sebanyak 15 jenis pelayanan telah memenuhi target indikator tahun 2022 dengan capaian target 100%. Volume / Jumlah Pelayanan administrasi kependudukan dan Legalisasi Surat, ditentukan oleh aktivitas dan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Bajuin. Untuk lebih jelasnya jenis pelayanan dan realisasi pelayanan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 28 berikut:

**Tabel 29. Realisasi Pelayanan Kecamatan Bajuin Tahun 2022**

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Pelayanan	Ket.
1	Pelayanan pembuatan Rekomendasi	1	Seksi Pelayanan
2	Pelayanan KTP Elektronik/Manual.	703	Seksi tapem
3	Pelayanan KK (Kartu Keluarga)	568	Seksi tapem
4	Pelayanan kartu identitas anak (KIA)	230	Seksi Tapem
5	Pelayanan legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris	45	Seksi Pelayanan
6	Pelayanan legalisasi pembuatan SKCK	8	Seksi pelayanan
7	Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Usaha (SKTU).	2	Seksi pelayanan
8	Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Domisili	19	Seksi pelayanan
9	Pelayanan Surat Keterangan Pindah	59	Seksi pelayanan
10	Pelayanan Surat Keterangan Kematian.	58	Seksi pelayanan
11	Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	35	Seksi pelayanan
12	Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Ijin Keramaian	4	Seksi Trantib
13	Pelayanan pembuatan Surat Dispensasi Nikah	15	Seksi Tapem
14	Pelayanan Surat Keterangan lainnya	8	Seksi pelayanan
15	Pelayanan Akta Kelahiran	310	Seksi Tapem

Jumlah pengaduan masyarakat yang difasilitasi yaitu ada 3 (tiga) yang ditindak lanjuti oleh Seksi Trantib sebagaimana sudah dijelaskan pada kegiatan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada halaman 66 - 67. Dengan demikian realisasi target mencapai 100 %.

Data Informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang disusun dalam bentuk laporan kegiatan seksi Pelayanan. Laporan Survei Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Bajuin Tahun 2022 dengan nilai Indeks kepuasan masyarakat (IKM) sebesar 88,63 dari 150 responden yang mengisi kuisioner.

Pelayanan surat ijin keramaian tidak ada realisasi, di karenakan penerapan protokol kesehatan COVID19 yang tidak mengijjinkan adanya kerumunan/ berkumpulnya massa/orang pada suatu tempat yang akan berdampak pada peningkatan penyebaran COVID19. Walaupun demikian masih ada warga yang datang mengurus ijin keramaian namun ditolak dengan alasan tersebut diatas.



**Gambar 16 .Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut**

**Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Seksi Pelayanan**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2021	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2022 TERHADAP TARGET TARGET RENSTRA
	Memberikan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)sesuai SOP	15	15	11	73,33%	100%
	Memfasilitasi penanganan aduan masyarakat	Jumlah pengaduan masyarakat yang difasilitasi	2	2	1	50%	100%
	Menyusun data informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah data informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	1	1	1	100%	100%

**1). Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya**

- Pada jumlah kegiatan PATEN terjadinya pengurangan dari realisasi tahun 2021 ada 15 menjadi 11 kegiatan yang terealisasi tahun 2022
- Pada jumlah penanganan pengaduan masyarakat yang difasilitasi dari realisasi tahun 2021 ada 2 menjadi 1 aduan yang terealisasi tahun 2022

**2). Perbandingan Realisasi dengan Target Akhir Renstra**

**0 %**

**3). Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia dan Program Kegiatan Pagu Anggaran ( Realisasi)**

Untuk Menunjang Kinerja Kepala Seksi Pelayanan, Terdapat 1 ASN dan 2 PTT dan Tahun 2022 efisiensi kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan dana makmin yang ada di sekretariat, sehubungan tidak dianggarkan pada DPA(pagu anggaran terbatas)

NO	Program	Pagu	Realisasi	Keterangan
1.	sosialisasi	-	-	Tidak dilaksanakan karena terbatasnya anggaran

**4). Kendala dan Rencana Aksinya**

Pada tahun 2022 kendala pada jaringan dan alat (Internet) yang sulit, sedangkan di pelayanan sangat memerlukan hal tersebut untuk kelancaran dan kemudahan akses yang diperlukan masyarakat. Rencana Aksinya *terpenuhinya* keperluan alat(Tab phone) pada akhir tahun 2022 dan awal 2023 jaringan wifi yang lancar

---

## 6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Jumlah pegawai dilingkup Kantor Kecamatan Bajuin sebanyak 22 (dua Puluh dua) orang yaitu 14 (empat belas) orang ASN dan 8 (delapan) orang PTT. Semua kebutuhan administrasi perkantoran terlayani dengan baik. Realisasi Target indikator kinerja mencapai 100%.

Jumlah sarana prasarana yang terpelihara dengan baik dan memadai sebagai sarana dan penunjang kegiatan sebanyak 367 unit yang terdaftar dalam inventarisasi barang dalam kondisi baik (tabel 14. Halaman 18).

Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian sampai dengan per 31 Desember 2022 sebanyak 14 (empat belas) ASN. Administrasi kepegawaian saat ini sudah menggunakan aplikasi SIMPeg yang memudahkan proses pencatatan dan pengolahan data dan informasi kepegawaian yang diminta.

Pada Tahun 2022 Jumlah pegawai kenaikan pangkat sebanyak 1 orang. Realisasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun 2022 sudah dilaksanakan penilaian oleh pimpinan sesuai tingkatannya dan ASN Lingkup kecamatan Bajuin tidak ada yang memiliki nilai rata-rata kurang atau sangat kurang.



**Gambar 17. Apel Pagi Karyawan di Halaman Kantor Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut**

Berdasarkan SOTK Kecamatan Bajuin yang terdiri dari Camat, Sekretaris, 2 Kasubag dan 5 Kasi serta jabatan JFU 25 orang dan 6 JFT. Namun jumlah Sumber Daya Manusia terkait yang menunjang pencapaian kinerja di Kecamatan Bajuin tahun 2022 hanya ada 14 ASN dan 8 PTT termasuk Penjaga dan petugas kebersihan.

Sangat diharapkan kedepannya Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan fungsional tertentu (pranata Komputer) dapat terpenuhi agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik . Karena sebagian besar kepala seksi tidak memiliki JFU, maka pelaksanaan kegiatan di seksi di tangani sendiri oleh kepala seksi. Hal ini sangat berpengaruh pada realisasi pelayanan.

Untuk meningkatkan mutu pelayanan dan pemenuhan SDM, Kecamatan Bajuin sudah berupaya meminta formasi jabatan yang kosong baik JFU ataupun JFT ke BKPSDM sesuai dengan proyeksi kebutuhan pegawai 5 (lima) tahun kedepan.



**Gambar 17. Rapat Koordinasi Kantor Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut**

**Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Sub Bagian Umum Kepegawaian**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>REALISASI 2021</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN 2022</b>	<b>CAPAIAN 2022 TERHADAP TARGET TARGET RENSTRA</b>
	Memberikan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah ASN yang administrasi perkantoran terlayani dengan baik	14 Orang	14 Orang	14 Orang	107%	100%
	Pemenuhan Sarana dan Prasanana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan Baik	367 Unit	367 Unit	367 Unit	100%	100%
	Memberikan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	14 Orang	14 Orang	14 Orang	107%	100%

**1.). Perbandingkan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya**

Perbandingannya sama dengan tahun sebelumnya 100%

**2). Perbandingkan Realisasi dengan Target Akhir Renstra**

Terealisasi nya 100%

**3). Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia**

Untuk Menunjang Kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Terdapat 2 ASN

<b>NO</b>	<b>Program</b>	<b>Pagu</b>	<b>Realisasi</b>
<b>1.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>472.528.810</b>	<b>482.272.195</b>

**4). Kendala dan Rencana Aksinya**

Sangat diharapkan kedepannya Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan fungsional tertentu (pranata Komputer) dapat terpenuhi agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik . Karena sebagian besar kepala seksi tidak memiliki JFU, maka pelaksanaan kegiatan di seksi di tangani sendiri oleh kepala seksi. Hal ini sangat berpengaruh pada realisasi pelayanan.

Untuk meningkatkan mutu pelayanan dan pemenuhan SDM, Kecamatan Bajuin sudah berupaya meminta formasi jabatan yang kosong baik JFU ataupun JFT ke BKPSDM sesuai dengan proyeksi kebutuhan pegawai 5 (lima) tahun kedepan.

## 7. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Dokumen Renja Perubahan 2022, Dokumen DPA-Perubahan 2022, Penetapan Kinerja 2022, Dokumen Renja 2022, RKA 2022 dan DPA 2022. Dengan demikian realisasi capaian target mencapai target (100%).



**Gambar 20. Sosialisasi Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD TA 2022**

Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku yaitu Laporan Kinerja Pemerintahan 2022, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 2022, Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 2022 dan Laporan Keuangan semesteran dan pronogsis 2022. Dengan demikian realisasi capaian target mencapai 100%.



**Gambar 21. Kegiatan Sosialisasi Penyusunan LPPD Tahun 2022**



**Gambar 21. Kegiatan Asistensi RKA-DPA Perubahan Kecamatan Bajuin Tahun 2022**

Untuk terciptanya pencapaian kinerja yang baik, Kecamatan Bajuin setiap bulannya melaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan perbulan, dalam rapat tersebut Camat beserta jajaran mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan, dan menyiapkan rencana untuk kegiatan selanjutnya.



**Gambar 22. Rapat Internal Kantor Kecamatan Bajuin terkait evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan.**

**Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Sub Perencanaan dan Keu**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>REALISASI 2021</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN 2022</b>	<b>CAPAIAN 2022 TERHADAP TARGET RENSTRA</b>
	Menyusun Dokumen Perencanaan Kinerja dan Perencanaan Keuangan	Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	100%
	Menyusun Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun sesuai ketentuan	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	100%

**1.). Perbandingkan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya**

Perbandingan nya sama dengan tahun sebelumnya 100%

**2). Perbandingkan Realisasi dengan Target Akhir Renstra**

Terealisasi nya 100%

**3). Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia**

Untuk Menunjang Kinerja Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ,Terdapat 4 ASN dan 1 PTT

<b>NO</b>	<b>Program</b>	<b>Pagu</b>	<b>Realisasi</b>
1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.460.230.609</b>	<b>2.106.673.770</b>

**4). Kendala dan Rencana Aksinya****Kendala**

1. Kurangnya personel staf/ASN yang menangani kegiatan laporan perencanaan SKPD (Laporan Renja APBD dan Renja Perubahan APBD, Laporan Perjanjian Kinerja (PK) Laporan Monev per Triwulan, serta Laporan Keuangan SKPD (Laporan Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Laporan Akhir Tahun).
2. Masih kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi staf subbag perencanaan dan keuangan dalam update peraturan perundangan bidang perencanaan pembangunan daerah, bidang pengelolaan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah untuk menyusun laporan sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditentukan dengan menggunakan manual maupun aplikasi yang telah disediakan oleh kemandagri RI dan Kemenkeu RI.

**Rencana Aksi**

1. Melakukan transfer *knowledge* kepada staf/ASN subbag perencanaan dan keuangan dalam rangka pemerataan pembagian tugas dan pekerjaan agar penyelesaian kerja menjadi tepat waktu sesuai aturan perundangan-undangan.
2. Melakukan pemanfaatan staf/ASN perencanaan dengan menggunakan hardware, software untuk penyusunan perencanaan daerah, pengelolaan penatausahaan pertanggungjawaban, pelaporan keuangan daerah sebagai SKPD yang mempunyai kewajiban melaporkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

## B. Akuntabilitas Keuangan

### 1. Anggaran dan Realisasi APBD 2022

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, kantor kecamatan Bajuin pada tahun 2022 Anggaran Pendapatan SKPD Kecamatan Bajuin Tahun 2022 ditetapkan dengan jumlah anggaran pendapatan sebesar Rp. 3.500.000,- dengan realisasi Rp. 0% dan Anggaran APBD Murni sebesar Rp 3.311.789.196.-,

Selanjutnya adanya APBD perubahan maka jumlah total APBD Perubahan sebesar Rp 3.434.695.515,-, sampai akhir tahun anggaran realisasi belanja langsung sebesar Rp.2.869.535.715,- atau 83,55%,

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 34 berikut:

**Tabel 34. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan Bajuin Tahun Anggaran 2022**

NO.	URAIAN	PAGU	REALISASI (Rp).	(%)
1.	<b>PENDAPATAN</b>	<b>3.500.000</b>	-	<b>0,00</b>
	<b>A. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>3.500.000</b>	-	<b>0,00</b>
	- Retribusi Daerah	<b>3.500.000</b>	-	<b>0,00</b>
2.	<b>BELANJA</b>	<b>3.434.695.515</b>	<b>2.869.535.715</b>	<b>83,55</b>
	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>3.363.248.715</b>	<b>2.804.785.715</b>	<b>83,40</b>
	- Belanja Pegawai	2.546.230.609	2.103.171.770	82,60
	- Belanja Barang	499.921.106	483.236.945	96,66
	- Belanja Hibah	317.097.000	218.377.000	68,87
3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>71.446.800</b>	<b>64.750.000</b>	<b>90,63</b>
	- Belanja Peralatan dan Mesin	71.446.800	64.750.000	90,63
	- Belanja Bangunan dan Gedung	0,00	0,00	0

## 2. Anggaran dan Realisasi menurut Program/Kegiatan.

Tabel 35. realisasi fisik dan keuangan belanja langsung berdasarkan program dan kegiatan kecamatan bajuin tahun anggaran 2022

No.	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi			
			Fisik		Keuangan	
			Kinerja	%	(Rp)	%
<b>1.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.550.230.609</b>	<b>75 Nilai</b>	<b>100</b>	<b>2.106.673.770</b>	<b>82,61</b>
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.546.230.609	12 Bulan	100	2.103.171.770	82,60
	b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	4.000.000	12 Dokumen	100	3.502.000	87,55
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>180.960.575</b>	<b>75 Nilai</b>	<b>100</b>	<b>167.209.434</b>	<b>92,40</b>
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.925.687	5 Jenis	100	2.589.000	88,49
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.064.988	4 Jenis	100	99.593.124	88,87
	c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.614.900	3 Jenis	100	4.446.000	96,34
	d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.480.000	1 Tahun	100	2.730.000	78,45
	e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.875.000	480 ok 480 ok 150 ok	100	57.851.310	99,96
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>229.559.166</b>	<b>75 Nilai</b>	<b>100</b>	<b>225.371.366</b>	<b>98,18</b>
	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.727.462	2 Rekening	100	18.354.738	84,48
	b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	207.831.703	2 Jenis 8 Orang	100	207.016.628	99,61
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>94.901.044</b>	<b>75 Nilai</b>	<b>100</b>	<b>91.691.395</b>	<b>96,62</b>
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	25.000.000	1 Unit	100	24.992.746	99,97
	b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.000.000	8 Unit 1 Unit	100	43.368.649	96,37
	c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	9.750.000	15 Unit	100	9.650.000	98,97
	d. Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung	15.151.044	2 Buah	100	13.680.000	90,29

2.	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>					
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>369.039.776</b>	<b>75 Nilai</b>	<b>100</b>	<b>268.599.750</b>	<b>72,78</b>
	a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Perundang-undangan dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	16.959.151	1 Kali	100	16.254.000	95,84
	b. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	352.080.625	2 Kegiatan 4 Kelompok	100	252.345.750	71,67
6.	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>					
	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>9.990.000</b>	<b>76,61 Nilai</b>	<b>100</b>	<b>9.990.000</b>	<b>100</b>
	a. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9.990.000	9 Desa	100	9.990.000	100
<b>JUMLAH</b>		<b>3.434.681.170</b>		<b>100</b>	<b>2.869.535.715</b>	<b>83,55</b>

Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja yang semua dapat terlaksana dengan baik, realisasi keuangan sebesar 83,55 lebih rendah dari tahun 2020 dikarenakan masih terjadinya bencana pandemi Covid-19, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 36. Realisasi Persentase keuangan, Fisik dan efisiensi Sasaran Strategis Kecamatan Bajuin Tahun 2022**

No.	Sasaran Strategis	% KEUANGAN	% Kinerja	% EFISIENSI
1.	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian	84,79	100	15,21
2.	Meningkatnya kualitas implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja			
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	86,39	100	13,61

### 3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan 2022

Pada tahun 2021 jumlah program 6 dan 11 kegiatan 25 Subkegiatan dibandingkan dengan tahun 2022 jumlah program 3 dan 6 kegiatan 16 Sub Kegiatan. Demikian juga dengan jumlah anggaran 2022 pada Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut total APBD Murni sebesar Rp 3.311.789.196.-, kemudian setelah adanya APBD perubahan maka jumlah total APBD Perubahan sebesar Rp 3.434.695.515,-, sampai akhir tahun anggaran realisasi belanja sebesar Rp 2.869.535.715,- atau 83,55%, secara umum dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Bajuin telah dapat merealisasikan Program dan Kegiatan Tahun 2022 dengan baik terjadi kenaikan dibandingkan tahun 2021 jumlah anggaran belanja langsung yaitu sebesar Rp. 908.284.738.-. Untuk lebih jelasnya perbandingan jumlah Program dan Kegiatan dan pagu 2021 – 2022 sebagai berikut :

**Tabel 37. Perbandingan Program dan Kegiatan Serta Pagu Anggaran Kecamatan Bajuin Tahun 2021-2022**

TAHUN 2021		TAHUN 2022	
Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Program	Nama Kegiatan
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		
<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		

<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		
<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
-	-		
-	-		
<b>Total</b>		<b>Total</b>	
6	11	3	6
<b>Total Anggaran</b>		<b>Total Anggaran</b>	
Rp. 908.284.738		Rp. 3. 434.695.515	

Bajuin melaksanakan sebanyak Realisasi belanja untuk tahun anggaran 2022 digunakan Untuk 3 (Tiga) program 6 (Enam) kegiatan dan 16 (Enam Belas) Sub Kegiatan pada Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut total APBD Murni sebesar Rp 3.311.789.196.-, kemudian setelah adanya APBD perubahan maka jumlah total APBD Perubahan sebesar Rp 3.434.695.515,-, sampai akhir tahun anggaran realisasi belanja sebesar Rp 2.869.535.715,- atau 78,81%, secara umum dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Bajuin telah dapat merealisasikan Program dan Kegiatan Tahun 2022 dengan baik, meski terjadi beberapa hambatan seperti Pelaksanakan Sub Kegiatan di Kasi Kemasyarakatan Yakni Realisasi Kegiatan Yang Sebelumnya di rencanakan ada 4 Kegiatan Hibah Tetapi Hanya bisa Dilaksanakan Untuk 3 Kegiatan Saja dikarenakan ada 1 kelompok penerima hibah yang tidak bisa dicairkan. Hal ini Terjadi disebabkan kelompok tersebut juga menerima hibah dari Pemda Tala Lewat Bagian Kesra Kab. Tanah Laut.

**Tabel 38. Perbandingan Realisasi Belanja dan Pendapatan pada Kecamatan Bajuin Tahun 2021-2022**

NO.	URAIAN	REALISASI (Rp).	
		2021	2022
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.332.500</b>	<b>0</b>
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>2.332.500</b>	<b>0</b>
	<i>Retribusi Daerah</i>	<i>2.332.500</i>	<i>0</i>
<b>2.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.988.655.500</b>	<b>2.869.535.715</b>
	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.865.075.500</b>	<b>2.804.785.715</b>
	<i>Belanja Pegawai</i>	<i>1.820.975.716</i>	<i>2.103.171.770</i>
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>604.744.784</i>	<i>483.236.945</i>
	<i>Belanja Hibah</i>	<i>439.355.000</i>	<i>218.377.000</i>
	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>123.580.000</b>	<b>64.750.000</b>
	<i>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</i>	<i>105.800.000</i>	<i>64.750.000</i>
	<i>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</i>	<i>17.780.000</i>	<i>0</i>

---

## BAB IV PENUTUP

### A. Simpulan

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 merupakan laporan pertanggungjawaban ketiga terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018–2023 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian terhadap **1 Sasaran 1 Indikator Kinerja Utama dengan tingkat capaian kinerja sangat memuaskan**, diuraikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja seluruh indikator sementara adalah 100,71 %.

### B. Strategi Peningkatan Kinerja

Upaya-upaya yang akan dilakukan Kecamatan Bajuin dalam rangka peningkatan kinerja sebagai berikut:

1. Terus meningkatkan komitmen Pimpinan dan seluruh jajaran dalam meningkatkan penerapan SAKIP lingkup SKPD Kecamatan Bajuin;
2. Meningkatkan komitmen dan kerjasama di dalam organisasi Kecamatan Bajuin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi;
3. Membangun Budaya Kerja yang merubah pola pikir/*mind set* Aparatur Sipil yang dulunya berorientasi kepada Anggaran berubah kepada Capaian Kinerja atau outcome yang menunjang visi misi Kabupaten;
4. Melakukan penyempurnaan pada keselarasan penjabaran kinerja (*cascade down*), mulai dari level SKPD sampai dengan indikator kinerja level eselon III, eselon IV dan individu pegawai;

- 
5. Mengoptimalkan dan meningkatkan potensi, Sumber Daya Manusia (SDM), dana dan sarana prasarana yang ada untuk menyediakan pelayanan masyarakat yang prima dengan dukungan program yang jelas dan terukur;
  6. Mendorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat melalui organisasi masyarakat ataupun individu masyarakat untuk mewujudkan Kecamatan Bajuin yang kondusif dengan masyarakat yang taat aturan;
  7. Meningkatkan kerjasama antara Kecamatan dan pihak swasta dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik dan pembangunan;
  8. Membenahi kultur negatif organisasi dengan mengubah pendekatan hirarkis menjadi pendekatan kolaborasi, mendelegasikan wewenang kepada bawahan, membuka hotline sebagai akses dari masyarakat ke pimpinan, mengevaluasi setiap bulan sekali kinerja atasan, bawahan dan sesama pegawai.

# LAMPIRAN



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN BAJUIN

Jalan Raya Bajuin No 1 Rt 6 Rw3 Desa Bajuin Kecamatan Bajuin

---

KEPUTUSAN CAMAT BAJUIN KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR : 10 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN  
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)  
KANTOR KECAMATAN BAJUIN KABUPATEN TANAH LAUT

CAMAT BAJUIN ,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel sebagai implementasi *Good Governance* dalam sistem pemerintahan diperlukan adanya pelaporan pencapaian kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan instansi pemerintah dan mengukur efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dalam melaksanakan program pembangunan berdasarkan rencana kinerja tahunan;
  - b. bahwa untuk mengukur pencapaian kinerja instansi pemerintah maka langkah yang dilakukan adalah dengan membuat dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - c. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj), perlu dibentuk Tim;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Camat Bajuin tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia);
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama (Berita Negara Republik Indonesia ;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2022 tanggal 31 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Keputusan Camat Bajuin Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan menyiapkan segala sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;
- b. mengadakan rapat koordinasi antar anggota tim dalam merumuskan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Tanah Laut;
- c. Pengumpulan data yang diperlukan dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Tanah Laut;
- d. menelaah dan memahami bahan yang telah disiapkan juga menganalisa data dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Tanah Laut;
- e. mengoreksi dalam penyelesaian pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Kabupaten Tanah Laut;
- f. mendiskusikan dengan Bidang terkait sehubungan pencarian data tambahan dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan

Kabupaten Tanah Laut; dan

- g. mengadakan perbaikan atau perubahan sehubungan pemantapan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Tanah Laut.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Tanah Laut bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Camat Bajuin Kabupaten TanahLaut.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kantor Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan Camat Bajuin Kabupaten Tanah Laut ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bajuin  
Pada Tanggal : 3 Januari 2021

Camat Bajuin,



Sabriyanur, S.STP, M.Si  
Pembina

NIP. 19690130 199002 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT  
BJUINNOMOR : 10 TAHUN 2022  
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN  
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LAKIP) DAN PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN BAJUIN  
TAHUN 2022**

No.	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Sekretaris	Ketua
2.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
3.	Kasi Tata Pemerintahan	Anggota
4.	Kasi Pelayanan	Anggota
5.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota
6.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Anggota
7.	Kasi Kemasyarakatan	Anggota
8.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota

Camat Bajuin,



**SAHRIYANUR, S.STP, M.Si**

NIP. 19820323 200012 1 004



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN BAJUIN

Jalan Raya Bajuin No 1 Rt 6 Rw3 Desa Bajuin Kecamatan Bajuin

## K E P U T U S A N CAMAT BAJUIN KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 17 TAHUN 2022

### TENTANG

### PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KANTOR KECAMATAN BAJUIN KABUPATEN TANAH LAUT

### CAMAT BAJUIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang handal di lingkungan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Bajuin Kabupaten Tanah Laut.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 276);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
  3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tenis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9).
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 89 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT BAJUIN KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KECAMATAN BAJUIN KABUPATEN TANAH LAUT.**

- KESATU : Keputusan Camat Bajuin Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Memerintahkan kepada seluruh Pegawai pada Kantor Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Bajuin  
Pada tanggal : 3 Januari 2022.

CAMAT BAJUIN,  
  
Sahriyanur S.STP, M.Si  
Pembina  
NIP

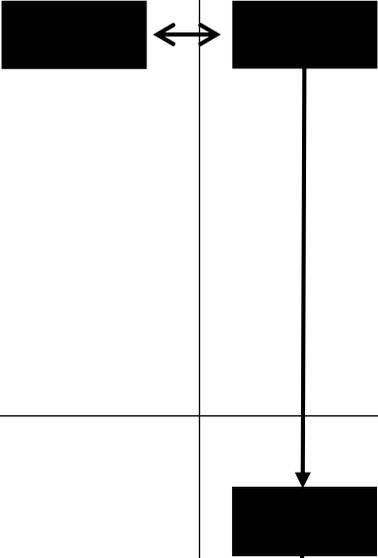
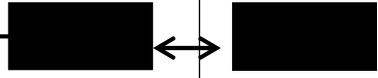
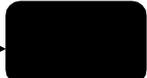
Lampiran : Keputusan Camat Bajuin Kabupaten Tanah Laut  
 Nomor : 17 Tahun 2022  
 Tanggal : 3 Januari 2022

**A. INFORMASI PROSEDUR**

 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT</b>  <b>KANTOR KECAMATAN BAJUIN</b></p>	Nomor SOP	
	Tgl pembuatan sebelum disahkan	
	Tgl ujicoba	
	Tgl Pengesahan	
	Disahkan Oleh	
	Nama SOP	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Pengendalian</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;</li> <li>Instruksi Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tim Penyusunan LAKIP terdiri dari Tim Penyusunan dan Staf Pendukung</li> <li>Kualifikasi anggota tim penyusunan LAKIP adalah mempunyai kemampuan dan menguasai substansi kinerja dan keuangan SKPD serta mempunyai kemampuan teknis pengolahan data termasuk aplikasi Komputer</li> <li>Peningkatan kompetensi tim penyusun LAKIP</li> <li>Hasil penyusunan LAKIP adalah berupa laporan LAKIP SKPD yang menjadi bahan laporan penyampaian pertanggung jawaban SKPD</li> </ol>	
<b>Identifikasi Risiko</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Keterbatasan pengetahuan tim penyusun</li> <li>Peraturan yang selalu berubah (dinamis)</li> <li>Tidak lengkapnya data yang diperlukan</li> </ol>		

**B. URAIAN PROSEDUR**

Uraian Prosedur		Pelaksanaan				Mutu Baku			Ket
		Inspektur	Sekretaris	Tim Penyusun	Staf Pendukung	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pembantuan rancangan SK Penyusun LAKIP SKPD					Draf Surat Keputusan Tim Penyusun LAKIPSKPD	1 hari	Rancangan SK lengkap dengan uraian tugas dan nama anggota Tim Penyusun LAKIP SKPD	
2	Usul Penetapan SK Tim Penyusun LAKIP SKPD keInspektur					Rancangan Surat Keputusan Tim Penyusun LAKIP SKPD	1 hari	Draf Surat Keputusan tim Penyusun LAKIP	
3	Penetapan SK Tim Penyusun LAKIP SKPD oleh Inspektur					Draf SK tim Penyusun LAKIPSKPD	1 hari	SK Tim Penyusun LAKIP SKPD ditandatangani Inspektur	
4	Penyusunan Agenda Kerja Tim LAKIP SKPD dan Pengumpulan Data/Informasi					Jadwal/agenda kerja dan matrik (checklist)materi /bahan penyusunan LAKIP	1 hari	Tersusunnya jadwal/agenda kerja tim dan tersedia data /informasi bahan penyusunan LAKIP	
5	Perumusan Rancangan LAKIP SKPD					Data dan informasi (tupoksi,struktur tata laksana, kepegawaian)d ol.renstra,IKU, RKT,RKA,Lakip thn sebelumnya dan info selainya	7 hari	Teridentifikasi tingkat capaian kinerja,potensi hambatan dan permasalahan SKPD Teridentifikasi isi-isu strategis Teridentifikasi program /kegiatan yang berorasi hasil	

6	Analisis					Gambaran tupokasi,SDM, kinerja dan keuangan SKPD,isu-isu strategis.visi misi tujuan/sasaran pelayanan jangka menengah,program/kegiatan/indikator kinerja/lelompok sasaran dan pendanaan indikatif	7 hari	Teridentifikasi tingkat,capaian kinerja,potensi hambatan dan permasalahan SKPD Teridentifikasi isu-isu strategis, Teridentifikasi program/kegiatan yang beroreantasi hasil	
7	Penyajian Rancangan LAKIP SKPD					Draf rancangan LAKIP SKPD sesuai hasil analitis	1 hari	Tersusunnya naskah rancangan LAKIP SKPD	
8	Perumusan rancangan akhir LAKIP SKPD					Naskah Rancangan LAKIP SKPD	3 Hari	Penjelasan rancangan LAKIP SKPD(visi misi,keseleraantujuan,sasaran ,strategi,kebijakan, program dan kegiatan) dan pemenuhan target	
9	Penyajian Rancangan Akhir LAKIP SKPD					Rancangan LAKIP SKPD yang dipertajam dan dilakukan penyelerasan LAKIP yang tersusun secara sistematis	1 Hari	kinerja dan keuangan. Dokumen LAKIP ditetapkan oleh inspektur Dokumen LAKIP ditetapkan oleh	
10	Penetapan LAKIP SKPD					Rancangan LAKIP SKPD yang dipertajam dan dilakukan penyelerasan LAKIP yang tersusun secara sistematis	1 Hari	Inspektur,dan dilakukan penggandaan dokumen oleh Sekretariat	

# INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN

- Kabupaten : Tanah Laut
- Nama SKPD : Kecamatan Bajuin
- Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah
- Fungsi : a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.  
b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.  
c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.  
d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.  
e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.  
f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan.  
g. Pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN RUMUSAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Kepada Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Umum Yang Ada Di Kecamatan (IKM)	Hasil Survey	Semua Seksi di Kecamatan Bajuin

Bajuin, Januari 2022

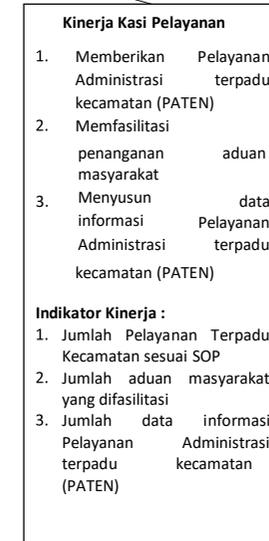
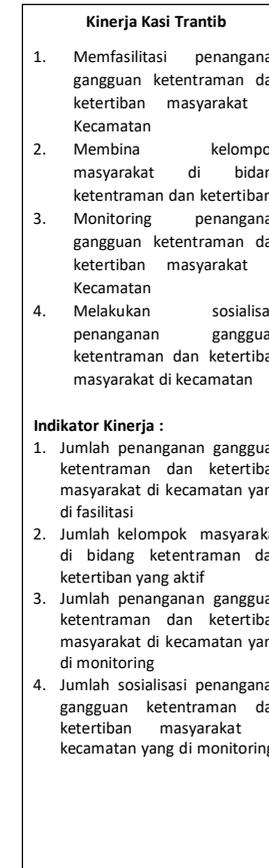
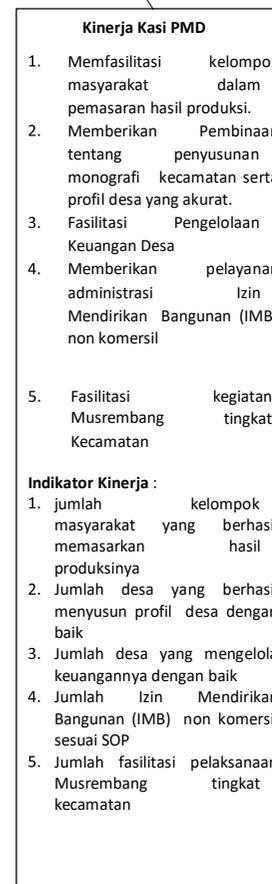
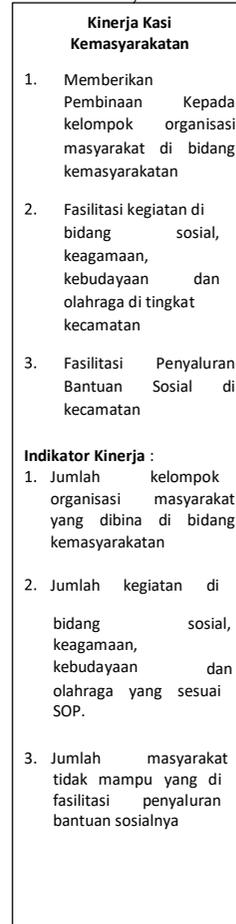
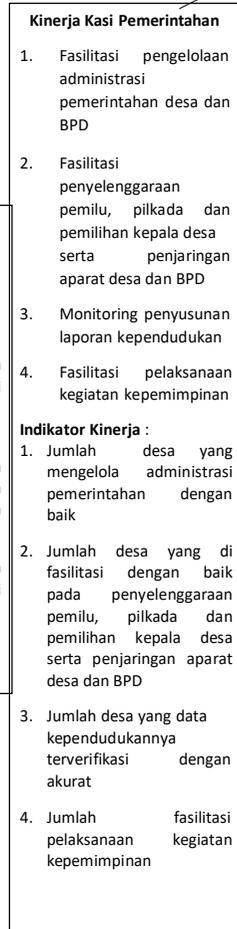
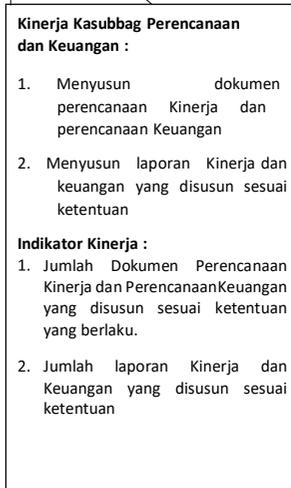
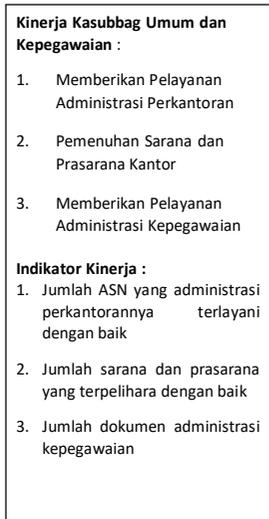
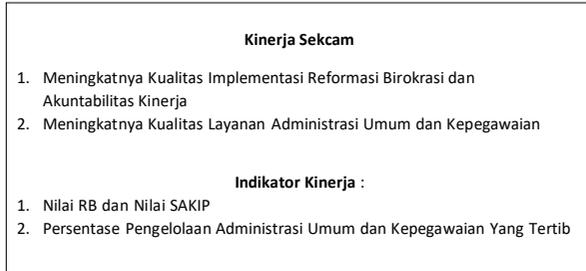
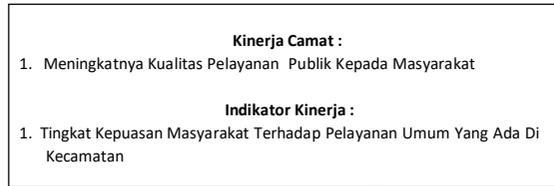
**CAMAT BAJUIN**



**Sahrivanur, S.STP, M.Si**  
Pembina  
NIP.196901301990021002



## POHON KINERJA SKPD KECAMATAN BAJUIN



Bajuin, Januari 2022



**Sahriyanur, S.STP, M.SI**  
Pembina  
NIP.19690130 199002 1 002

**MATRIK SINKRONISASI PROGRAM RPJMD, RKPD, RKA, DPA KECAMATAN BAJUIN  
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022**

NO	NAMA PROGRAM				
	RPJMD	RKPD	RENJA	RKA	DPA
1	2	3	4	5	6
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia				
3	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD				
4	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
5	Program Koordinasi dan Fasilitasi ketenteraman dan ketertiban Umum Masyarakat	3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6	Program Koordinasi dan Fasilitasi kegiatan keagamaan, sosial dan kebudayaan di masyarakat	4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
7	Program Koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa				
8	Program perencanaan pembangunan Kecamatan	5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
9	Program Pemberdayaan Masyarakat	6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan



Bajuin, Januari 2022

**CAMAT BAJUIN,**

**SAHRIYANUR, S.STP, M.SI**

Pembina

NIP.19690130 199002 1 002



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2022

TRIMULAN I

Bajun

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
				7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14,5 x100%						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
Semua Bidang																										
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA</b>					3.055.665.739		424.067.150								424.067.150		13,88%		424.067.150		0,00%	Bajun		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*) (%)	0,00		0,00		100	39								39		39,00%		39,00		0,00%			
			Prosentase pemenuhan a Pengelolaan Administrasi penatausahaan dan peranggungjawaban keuangan dengan tepat waktu sesuai Kelentutan yang berlaku. (100%)	0,00		0,00		100	26								26		28,00%		28,00		0,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN*) (bulan)	0,00		0,00		12	2.546.230.609								3	347.633.433	25,00%	13,65%	3,00	347.633.433	0,00%	0,00%		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0,00		0,00		12	4.000.000								3	2.000	25,00%	0,05%	3,00	2.000	0,00%	0,00%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*) (%)	0,00		0,00		100	180.960.575								63	10.358.592	63,00%	5,72%	63,00	10.358.592	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan*) (unit)	0,00		0,00		5	2.925.687										0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*) (unit)	0,00		0,00		5	112.064.989								1	9.023.592	25,00%	8,05%	1,25	9.023.592	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan*) (unit)	0,00		0,00		3	4.614.900										0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan/Koran (Tahun/bulan)	0,00		0,00		1	3.480.000								0	660.000	25,00%	18,97%	0,25	660.000	0,00%	0,00%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pemenuhan Kebutuhan Rapat Koordinasi dan Pejajanan Dinas (Tahun)	0,00		0,00		12	57.875.000								3	675.000	25,00%	1,17%	3,00	675.000	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*) (%)	0,00		0,00		100	229.573.511								29	62.053.731	29,00%	27,03%	29,00	62.053.731	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*) (bulan)	0,00		0,00		2	21.727.462								1	3.218.623	25,00%	14,81%	0,50	3.218.623	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor *) (bulan)	0,00		0,00		12	207.846.049								3	58.835.108	25,00%	28,31%	3,00	58.835.108	0,00%	0,00%		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara *) (%)	0,00		0,00		100	94.901.044								46	4.019.394	46,00%	4,24%	46,00	4.019.394	0,00%	0,00%		



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2022  
 TRIWULAN II  
 Bajuran

P

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPJMD Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan anggaran belanja tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Ankr Tahun Pelaksanaan RPJMD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan				
					I		II		III		IV		K		Rp		K		Rp		K		Rp				K		Rp	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/100%	14 = G + 12	15=14/5 x100%	16	17													
Semua Bidang																														
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						3.055.665.739	424.067.150		957.484.113						1.381.551.263		45,21%		1.381.551.263		0,00%		Bajuran					
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu* (%)	0,00	0,00	100	39	39	39							79	78,00%	78,00%	78,00%	0,00%	0,00%									
			Prosentasi pemenuhan a Pengadaan Administrasi penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan dengan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. (100%)	0,00	0,00	100	28	22	22							22	22,00%	22,00%	22,00%	0,00%	0,00%									
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN* (bulan)	0,00	0,00	12	3	6	6							6	50,00%	45,10%	6,00	1.148.471.595	0,00%	0,00%								
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0,00	0,00	12	3	6	6							6	2,00%	0,05%	6,00	2.000	0,00%	0,00%								
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah* (%)	0,00	0,00	100	63	13	13							13	80,928.132	13,00%	44,72%	13,00	80.928.132	0,00%	0,00%							
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan* (unit)	0,00	0,00	5	2.925.687	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%							
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan* (unit)	0,00	0,00	5	112.064.988	5	5	5						3	57.023.592	50,00%	50,88%	2,50	57.023.592	0,00%	0,00%							
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan* (unit)	0,00	0,00	3	4.614.900	-	-	-						-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%							
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan/Koran (Tahun/bulan)	0,00	0,00	1	3.480.000	1	1	1						1	1.320.000	50,00%	37,93%	0,50	1.320.000	0,00%	0,00%							
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pemenuhan kebutuhan Rapat Koordinasi dan Perjalanan Dinas (Tahun)	0,00	0,00	12	57.875.000	3	6	6						6	22.584.540	50,00%	39,02%	6,00	22.584.540	0,00%	0,00%							
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* (%)	0,00	0,00	100	229.573.511	29	24	24						24	117.660.182	24,00%	51,25%	24,00	117.660.182	0,00%	0,00%							
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* (bulan)	0,00	0,00	2	21.727.462	2	2	2						1	7.916.514	50,00%	36,44%	1,00	7.916.514	0,00%	0,00%							
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor* (bulan)	0,00	0,00	12	207.846.040	3	6	6						6	109.743.668	50,00%	52,80%	6,00	109.743.668	0,00%	0,00%							
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara* (%)	0,00	0,00	100	94.901.044	46	17	17						17	34.489.354	17,00%	36,34%	17,00	34.489.354	0,00%	0,00%							



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2022

TRIWULAN III

Bajun

P

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 (n-2)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2022/Ahkr Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
				7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Semua Bidang																									
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA</b>					3.055.665.739	424.067.150	957.484.113	498.175.127						1.879.726.390	61.52%	1.879.726.390	0.00%		Bajun				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*) (%)	0.00	0.00	100	39	39	11						89	89.00%	89.00	0.00%							
			Prosentase pemenuhan a Pengalokasian Administrasi penatuaan dan pengunggugan keuangan dengan tepat waktu sesuai Kebutuhan yang berlaku. (100%)	0.00	0.00	100	28	22	22						22	22.00%	22.00	0.00%							
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN*) (bulan)	0.00	0.00	12	2.546.230.609	347.633.433	800.838.162	398.713.611					9	1.547.185.206	75.00%	60.76%	9.00	1.547.185.206	0.00%	0.00%			
		Pelaksanaan Penatuaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatuaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0.00	0.00	12	4.000.000	2.000	6	1.500.000					9	1.502.000	75.00%	37.55%	9.00	1.502.000	0.00%	0.00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*) (%)	0.00	0.00	100	180.960.575	63	10.358.592	13	70.569.540	12	19.404.532		12	100.332.664	12.00%	55.44%	12.00	100.332.664	0.00%	0.00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan*) (unit)	0.00	0.00	5	2.925.687	-	-	-							0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*) (unit)	0.00	0.00	5	112.064.988	5	9.023.592	5	48.000.000	5	8.694.532		4	65.718.124	75.00%	58.64%	3.75	65.718.124	0.00%	0.00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan*) (unit)	0.00	0.00	3	4.614.900	-	-	-			2	500.000	2	500.000	66.67%	10.83%	2.00	500.000	0.00%	0.00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan/Koran (Tahun/bulan)	0.00	0.00	1	3.480.000	1	660.000	1	660.000	1	660.000		1	1.980.000	75.00%	56.90%	0.75	1.980.000	0.00%	0.00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pemenuhan kebutuhan Rapat Koordinasi dan Perjalanan Dinas (Tahun)	0.00	0.00	12	57.875.000	3	675.000	6	21.909.540	9	9.550.000		9	32.134.540	75.00%	55.52%	9.00	32.134.540	0.00%	0.00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*) (%)	0.00	0.00	100	229.573.511	29	62.053.731	24	55.606.451	24	52.778.829		24	170.439.011	24.00%	74.24%	24.00	170.439.011	0.00%	0.00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*) (bulan)	0.00	0.00	2	21.727.462	2	3.218.623	2	4.697.891	2	4.142.349		2	12.058.863	75.00%	55.50%	1.50	12.058.863	0.00%	0.00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor *) (bulan)	0.00	0.00	12	207.846.049	3	58.835.108	6	50.908.560	9	48.636.480		9	158.380.148	75.00%	76.20%	9.00	158.380.148	0.00%	0.00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara *) (%)	0.00	0.00	100	94.901.044	46	4.019.394	17	30.469.960	26	25.778.155		26	60.267.509	26.00%	63.51%	26.00	60.267.509	0.00%	0.00%			

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpeliharasi* (unit)	0,00	0,00	1	25.000.000	1	480.000	1	6.078.460	1	7.290.855	1	13.849.315	75,00%	55,40%	0,75	13.849.315	0,00%	0,00%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpeliharasi* (unit)	0,00	0,00	9	45.000.000	9	3.539.394	9	15.016.500	9	10.132.300	7	28.688.194	75,00%	63,75%	6,75	28.688.194	0,00%	0,00%		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpeliharasi* (unit)	0,00	0,00	15	9.750.000	-	-	-	-	-	10	4.050.000	66,67%	41,54%	10,00	4.050.000	0,00%	0,00%			
	Pemeliharaan/Rahibilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpeliharasi/terpeliharasi* (unit)	0,00	0,00	2	15.151.044	-	-	1	9.375.000	1	4.305.000	2	13.680.000	100,00%	90,29%	2,00	13.680.000	0,00%	0,00%		
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	75,01%	61,52%					
															Predikat Kinerja	Tinggi	Rendah					
	<b>KECAMATAN</b>																					
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>					369.039.776		60.575.000		87.802.000		40.212.750				188.589.750		51,10%		188.589.750	0,00%	Bajin
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, antirasu dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan (%)	0,00	0,00	100	369.039.776	96	60.575.000	2	87.802.000	3	40.212.750		3	188.589.750	3,00%	51,10%	3,00	188.589.750	0,00%	0,00%	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Peningkatan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Peserta Pasikbra dalam Peringatan HUT RI di Tingkat Kecamatan (Peserta)	0,00	0,00	1	16.959.151	-	-	-	-	-	1	16.254.000	100,00%	95,84%	1,00	16.254.000	0,00%	0,00%			
	Pembinaan Kerukunan Antar-suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Penyaluran Hibah Bantuan Sosial (Penerima)	0,00	0,00	3	352.080.625	1	60.575.000	2	87.802.000	-	23.958.750			172.335.750	0,00%	48,96%	0,00	172.335.750	0,00%	0,00%	
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	4,60%	51,10%					
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Rendah					
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>					9.990.000		6.750.000		-		-				6.750.000		67,57%		6.750.000	0,00%	Bajin
	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (%)	0,00	0,00	100	9.990.000	100	6.750.000	-	-	-	-	-	-	6.750.000	0,00%	67,57%	0,00	6.750.000	0,00%	0,00%	
	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah musrenbang kecamatan (Kali)	0,00	0,00	2	9.990.000	1	6.750.000	-	-	-	-	-	-	6.750.000	0,00%	67,57%	0,00	6.750.000	0,00%	0,00%	
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	67,57%					
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sedang					
						3.434.695.515									<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM</b>	<b>67,23%</b>	<b>60,41%</b>					
															<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM</b>	<b>Sedang</b>	<b>Rendah</b>					

No.	INTERVAL NILAI REALISASINYA	KRITERIA PENILAIAN REALISASINYA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah





	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (terpelihara) (unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (terpelihara) (unit)	0,00	-	0,00	-	1	25.000.000	1	480.000	1	6.078.460	1	7.290.855	1	11.143.431	1	24.992.746	100,00%	99,97%	1,00	24.992.746	0,00%	0,00%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (unit)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (terpelihara) (unit)	0,00	-	0,00	-	9	45.000.000	9	3.539.394	9	15.016.500	9	10.132.300	9	14.680.455	9	43.368.649	100,00%	96,37%	9,00	43.368.649	0,00%	0,00%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya (terpelihara) (unit)	0,00	-	0,00	-	15	9.750.000	-	-	-	-	10	4.050.000	15	5.600.000	15	9.650.000	100,00%	98,97%	15,00	9.650.000	0,00%	0,00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (terpelihara) (unit)	0,00	-	0,00	-	2	15.151.044	-	-	1	9.375.000	1	4.305.000	-	-	2	13.680.000	100,00%	90,29%	2,00	13.680.000	0,00%	0,00%
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	84,79%			
																			Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Tinggi			
<b>KECAMATAN</b>																								
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>							369.039.776		60.575.000		87.802.000		40.212.750		80.010.000		268.599.750		72,78%		268.599.750	0,00%	Bajun
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan, kebhaharian nasional, antirasuik dan/terasuk, umat beragama, ras dan golongan ( % )	0,00	-	0,00	-	100	369.039.776	95	60.575.000	2	87.802.000	3	40.212.750	-	80.010.000	-	268.599.750	0,00%	72,78%	0,00	268.599.750	0,00%	0,00%
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Keltahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Peserta Pasikbra dalam Peningkatan HUT RI di Tingkat Kecamatan (Peserta)	0,00	-	0,00	-	1	16.959.151	-	-	-	-	1	16.254.000	1	-	1	16.254.000	100,00%	95,84%	1,00	16.254.000	0,00%	0,00%
	Pembinaan Kerukunan Antarasuk dan Intrasuk, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Penyaluran Hibah Bantuan Sosial (Penerima)	0,00	-	0,00	-	3	352.080.625	1	60.575.000	2	87.802.000	-	23.958.750	3	80.010.000	3	252.345.750	100,00%	71,67%	3,00	252.345.750	0,00%	0,00%
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	72,78%			
																			Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sedang			
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>							9.990.000		6.750.000		-		-		3.240.000		9.990.000		100,00%		9.990.000	0,00%	Bajun
	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	0,00	-	0,00	-	100	9.990.000	100	6.750.000	-	-	-	-	-	3.240.000	-	9.990.000	0,00%	100,00%	0,00	9.990.000	0,00%	0,00%
	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah musrenbang kecamatan (Kali)	0,00	-	0,00	-	2	9.990.000	1	6.750.000	-	-	-	-	2	3.240.000	2	9.990.000	100,00%	100,00%	2,00	9.990.000	0,00%	0,00%
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	100,00%			
																			Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
								3.434.695.515												<b>100,00%</b>	<b>83,55%</b>			
																				<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Tinggi</b>			

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah



(5)	$\leq 50\%$	Sangat Rendah
-----	-------------	---------------



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## KECAMATAN BAJUIN

Jalan Bajuin Raya No.01 RT.06 Desa Bajuin  
BAJUIN

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NAHRIN FAUZI, S.Sos  
Jabatan : CAMAT BAJUIN KABUPATEN TANAH LAUT

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. SUKAMTA  
Jabatan : BUPATI TANAH LAUT

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

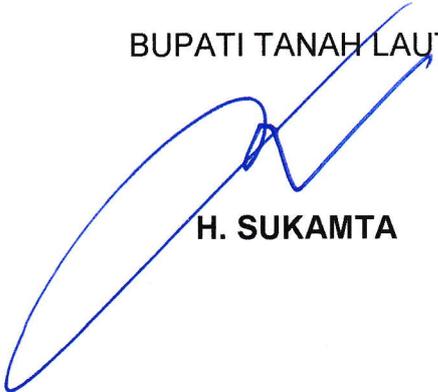
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bajuin, 3 Januari 2022

BUPATI TANAH LAUT,

CAMAT BAJUIN,

  
H. SUKAMTA

  
NAHRIN FAUZI, S.Sos  
NIP.19690130 199002 1 002

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

JABATAN : CAMAT ( Pejabat Eselon III a)  
 SOPD : KANTOR KECAMATAN BAJUIN  
 TAHUN ANGGARAN : 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	88

**Keterangan :**

- \* Jumlah Program : 3 Program
- \* Jumlah Kegiatan : 6 Kegiatan
- \* Jumlah sub Kegiatan : 16 sub Kegiatan
- \* Jumlah Anggaran : **Rp 3.311.789.195**

<b>1.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.311.789.195</b>
1.	<b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>2.460.230.609</b>
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.456.230.609
b.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.000.000
2.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>144.096.717</b>
a.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.925.687
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.076.130
c.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.614.900
d.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.480.000
e.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50.000.000
3.	<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>226.531.049</b>
a.	Penyediaan Jasa,Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	18.699.345
b.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	207.831.704
4.	<b>Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>101.901.044</b>
a.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	27.500.000
b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.500.000
c.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.750.000
d.	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	15.151.044
<b>2.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>369.039.776</b>
1.	<b>Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah</b>	<b>369.039.776</b>

a.	Pembinaan Wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia	16.959.151
b.	Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	352.080.625
<b>3.</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>9.990.000</b>
<b>1.</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>9.990.000</b>
a.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9.990.000

Bajuin, 3 Januari 2022

**BUPATI TANAH LAUT,**

**CAMAT BAJUIN**



**H. SUKAMTA**



**NAHRIN FAUZI, S.Sos**

NIP. 19690130 199002 1 002



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## KECAMATAN BAJUIN

Jalan Bajuin Raya No.01 RT.06 Desa Bajuin

**B A J U I N**

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. SAHRIYANUR, S.STP, M.Si  
Jabatan : CAMAT BAJUIN KABUPATEN TANAH LAUT

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. SUKAMTA  
Jabatan : BUPATI TANAH LAUT

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bajuin, 24 Februari 2022

BUPATI TANAH LAUT,

H. SUKAMTA

CAMAT BAJUIN,

H. SAHRIYANUR, S.STP, M.Si  
NIP. 19820323 200012 1 004

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

JABATAN : CAMAT ( Pejabat Eselon III a)  
 SOPD : KANTOR KECAMATAN BAJUIN  
 TAHUN ANGGARAN : 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	88

**Keterangan :**

- \* Jumlah Program : 3 Program
- \* Jumlah Kegiatan : 6 Kegiatan
- \* Jumlah sub Kegiatan : 16 sub Kegiatan
- \* Jumlah Anggaran : **Rp 3.311.789.195**

<b>1.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.311.789.195</b>
1.	<b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>2.460.230.609</b>
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.456.230.609
b.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.000.000
2.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>144.096.717</b>
a.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.925.687
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.076.130
c.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.614.900
e.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.480.000
f.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50.000.000
3.	<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>226.531.049</b>
a.	Penyediaan Jasa,Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	18.699.345
b.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	207.831.704
4.	<b>Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>101.901.044</b>
a.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	27.500.000
b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.500.000
c.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.750.000
d.	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	15.151.044
2.	<b>PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>369.039.776</b>
1.	<b>Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah</b>	<b>369.039.776</b>

a.	Pembinaan Wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara reublik Indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia	16.959.151
b.	Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	352.080.625
<b>3.</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>9.990.000</b>
<b>1.</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>9.990.000</b>
a.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9.990.000

**BUPATI TANAH LAUT,**

H. SUKAMTA

Bajuin, 22 Februari 2022

**CAMAT BAJUIN**

H. SAHRIYANUR, S.STP, M.Si

NIP. 19820323 200012 1 004



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN BAJUIN

Jalan Bajuin Raya No.01 RT.06 Desa Bajuin  
BAJUIN

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. SAHRIYANUR, S.STP, M.Si  
Jabatan : Plt. CAMAT BAJUIN KABUPATEN TANAH LAUT

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. SUKAMTA  
Jabatan : BUPATI TANAH LAUT

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

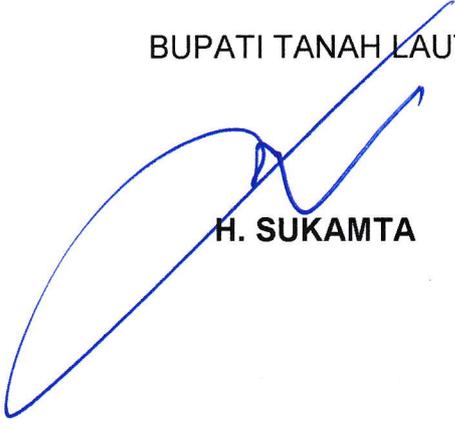
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

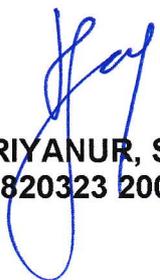
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bajuin, 14 Januari 2022

BUPATI TANAH LAUT,

Plt. CAMAT BAJUIN,

  
H. SUKAMTA

  
H. SAHRIYANUR, S.STP, M.Si  
NIP. 19820323 200012 1 004

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

JABATAN : Plt. CAMAT ( Pejabat Eselon III a)  
 SOPD : KANTOR KECAMATAN BAJUIN  
 TAHUN ANGGARAN : 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	88

**Keterangan :**

- \* Jumlah Program : 3 Program
- \* Jumlah Kegiatan : 6 Kegiatan
- \* Jumlah sub Kegiatan : 16 sub Kegiatan
- \* Jumlah Anggaran : **Rp 3.311.789.195**

<b>1.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.311.789.195</b>
1.	<b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>2.460.230.609</b>
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.456.230.609
b.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.000.000
2.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>144.096.717</b>
a.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.925.687
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.076.130
c.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.614.900
e.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.480.000
f.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50.000.000
3.	<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>226.531.049</b>
a.	Penyediaan Jasa,Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	18.699.345
b.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	207.831.704
4.	<b>Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>101.901.044</b>
a.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	27.500.000
b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.500.000
c.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.750.000
d.	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	15.151.044
<b>2.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>369.039.776</b>
1.	<b>Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah</b>	<b>369.039.776</b>

a.	Pembinaan Wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia	16.959.151
b.	Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	352.080.625
<b>3.</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>9.990.000</b>
<b>1.</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>9.990.000</b>
a.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9.990.000

**BUPATI TANAH LAUT,**

H. SUKAMTA

Bajuin, 14 Januari 2022

**Pt. CAMAT BAJUIN**

H. SAHRIYANUR, S.STP, M.Si

NIP. 19820323 200012 1 004



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## KECAMATAN BAJUIN

Jalan Bajuin Raya No.01 RT.06 Desa Bajuin

B A J U I N

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. SAHRIYANUR, S.STP, M.Si  
Jabatan : SEKRETARIS

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NAHRIN FAUZI, S.Sos  
Jabatan : CAMAT BAJUIN KABUPATEN TANAH LAUT

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bajuin, 3 Januari 2022

CAMAT BAJUIN,

**NAHRIN FAUZI, S.Sos**  
NIP.19690130 199002 1 002

SEKRETARIS,

**H. SAHRIYANUR, S.STP, M.Si**  
NIP. 19820323 200012 1 004

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

JABATAN : SEKRETARIS CAMAT  
 SOPD : KANTOR KECAMATAN BAJUIN  
 TAHUN ANGGARAN : 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
1. Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	1. Nilai RB Nilai SAKIP	70 (B) 82 (A)
2. Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian	2. Persentase Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian yang Tertib sesuai SOP	100%
	3. Persentase pengelolaan perencanaan pelaporan keuangan yang tertib dan tepat waktu	100%

**Keterangan :**

- \* Jumlah Program : 1 Program
- \* Jumlah Kegiatan : 4 Kegiatan
- \* Jumlah sub Kegiatan : 13 sub Kegiatan
- \* Jumlah Anggaran : **Rp 2.932.759.419**

<b>1.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.932.759.419</b>
<b>1.</b>	<b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>2.460.230.609</b>
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.456.230.609
b.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.000.000
<b>2</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>144.096.717</b>
a.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.925.687
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.076.130
c.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.614.900
e.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.480.000
f.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50.000.000

<b>3</b>	<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>226.531.049</b>
a.	Penyediaan Jasa,Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	18.699.345
b.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	207.831.704
<b>4</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>101.901.044</b>
a.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	27.500.000
b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.500.000
c.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.750.000
d.	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	15.151.044

Bajuin, 3 Januari 2022

**CAMAT BAJUIN**



**NAHRIN FAUZI, S.Sos**

NIP. 19690130 199002 1 002

**SEKRETARIS**



**H. SAHRIYANUR, S.STP, M.Si**

NIP. 19820323 200012 1 004



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN BAJUIN

Jalan Bajuin Raya No.01 RT.06 Desa Bajuin

B A J U I N

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PAIMUN, ST  
Jabatan : SEKRETARIS CAMAT

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. SAHRIYANUR, S.STP, M.Si  
Jabatan : CAMAT BAJUIN KABUPATEN TANAH LAUT

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

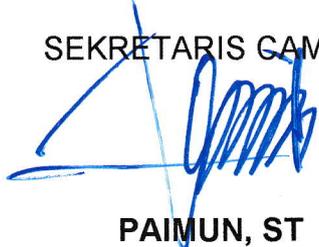
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bajuin, 24 Februari 2022

CAMAT BAJUIN,

SEKRETARIS CAMAT,

  
H. SAHRIYANUR, S.STP, M.Si  
NIP. 19820323 200012 1 004

  
PAIMUN, ST  
NIP. 19690512 200701 1 032

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

JABATAN : SEKRETARIS CAMAT  
 SOPD : KANTOR KECAMATAN BAJUIN  
 TAHUN ANGGARAN : 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
1. Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	1. Nilai RB Nilai SAKIP	70 (B) 82 (A)
2. Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian	2. Persentase Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian yang Tertib sesuai SOP	100%
	3. Persentase pengelolaan perencanaan pelaporan keuangan yang tertib dan tepat waktu	100%

**Keterangan :**

\* Jumlah Program : 1 Program  
 \* Jumlah Kegiatan : 4 Kegiatan  
 \* Jumlah sub Kegiatan : 13 sub Kegiatan  
 \* Jumlah Anggaran : **Rp 2.932.759.419**

<b>1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.932.759.419</b>
<b>1. Administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>2.460.230.609</b>
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.456.230.609
b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.000.000
<b>2. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>144.096.717</b>
a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.925.687
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.076.130
c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.614.900
e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.480.000
f. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50.000.000
<b>3. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>226.531.049</b>
a. Penyediaan Jasa, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.699.345
b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	207.831.704
<b>4. Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>101.901.044</b>
a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	27.500.000
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.500.000
c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.750.000
d. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	15.151.044

Bajuin, 24 Februari 2022

CAMAT BAJUIN,

**H. SAHRIYANUR, S.STP, M.Si**  
 NIP. 19820323 200012 1 004

SEKRETARIS,

**PAIMUN, ST**  
 NIP. 19690512 200701 1 032





# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## KECAMATAN BAJUIN

Jalan Bajuin Raya No.01 RT.06 Desa Bajuin

**B A J U I N**

---

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD NOOR, S.Sos  
Jabatan : KASI TATA PEMERINTAHAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NAHRIN FAUZI, S.Sos  
Jabatan : CAMAT BAJUIN KABUPATEN TANAH LAUT

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bajuin, 3 Januari 2022

CAMAT BAJUIN,

**NAHRIN FAUZI, S.Sos**  
**NIP.19690130 199002 1 002**

KASI TATA PEMERINTAHAN

**MUHAMMAD NOOR, S.Sos**  
**NIP.19670626 1989031 014**

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

JABATAN : KASI TATA PEMERINTAHAN  
OPD : KANTOR KECAMATAN BAJUIN  
TAHUN ANGGARAN : 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
1. Memfasilitasi Pengelolaan administrasi Pemerintahan Desa dan BPD	1. Jumlah desa yang mengelola administrasi pemerintahan dengan baik	9 Desa
2. Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemilu, Pilkada, dan Pemilihan Kepala Desa serta penjangkaran aparat desa dan BPD	2. Jumlah desa yang di fasilitasi dengan baik pada penyelenggaraan Pemilu, Pilkada, dan Pemilihan Kepala Desa serta penjangkaran aparat desa dan BPD	9 Desa
3. Memonitoring Penyusunan Laporan Kependudukan	3. Jumlah Desa yang Data Kependudukannya terverifikasi Dengan Akurat	9 Desa
4. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan	4. Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan	1 Kegiatan

### Keterangan :

- \* Jumlah Program : 1 Program
- \* Jumlah Kegiatan : 1 Kegiatan
- \* Jumlah sub Kegiatan : 1 sub Kegiatan
- \* Jumlah Anggaran : **Rp 16.959.151**

<b>1. PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>16.959.151</b>
<b>1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah</b>	<b>16.959.151</b>
a. Pembinaan Wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara reublik Indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia	16.959.151

Bajuin, 3 Januari 2022

**CAMAT BAJUIN**



**NAHRIN FAUZI, S.Sos**  
NIP. 19690130 199002 1 002

**KASI TATA PEMERINTAHAN**



**MUHAMMAD NOOR, S.Sos**  
NIP. 19670626 198903 1 014



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## KECAMATAN BAJUIN

Jalan Bajuin Raya No.01 RT.06 Desa Bajuin

B A J U I N

---

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AKHMAD RIDHA S.KEP, NERS  
Jabatan : Kasi Pelayanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NAHRIN FAUZI, S.Sos  
Jabatan : Camat Bajuin Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bajuin, 3 Januari 2022

CAMAT BAJUIN,

**NAHRIN FAUZI, S.Sos**  
NIP.19690130 199002 1 002

KASI PELAYANAN,

**AKHMAD RIDHA S.KEP, NERS**  
NIP.19741010 199502 1 001

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

JABATAN : KASI PELAYANAN  
OPD : KANTOR KECAMATAN BAJUIN  
TAHUN ANGGARAN : 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
1. Memberikan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	1. Jumlah Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SOP	15 Jenis Pelayanan
2. Memfasilitasi penanganan Aduan Masyarakat	2. Jumlah pengaduan masyarakat yang difasilitasi	2 Pengaduan
3. Menyusun Data informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	3. Jumlah Data Informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	1 Dokumen

**CAMAT BAJUIN**



**NAHRIN FAUZI, S.Sos**

NIP. 19690130 199002 1 002

Bajuin, 3 Januari 2022

**KASI PELAYANAN**



**AKHMAD RIDHA, S. KEP, NERS**

NIP.19741010 199502 1 001



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## KECAMATAN BAJUIN

Jalan Bajuin Raya No.01 RT.06 Desa Bajuin

**B A J U I N**

---

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD NOOR, S.Sos, M.AB  
Jabatan : KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NAHRIN FAUZI, S.Sos  
Jabatan : CAMAT BAJUIN KABUPATEN TANAH LAUT

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bajuin, 3 Januari 2022

CAMAT BAJUIN,

**NAHRIN FAUZI, S.Sos**  
NIP.19690130 199002 1 002

KASI PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DESA,

**MUHAMMAD NOOR, S.Sos, M.AB**  
NIP.19750309 200501 1 005

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

JABATAN : KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
SOPD : KANTOR KECAMATAN BAJUIN  
TAHUN ANGGARAN : 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
1. Memfasilitasi Kelompok Masyarakat dalam Pemasaran Hasil Produksi	1. Jumlah kelompok masyarakat yang berhasil memasarkan hasil produksinya	9 kelompok
2. Memberikan Pembinaan tentang Penyusunan Monografi Kecamatan serta Profil Desa yang Akurat	2. Jumlah Desa yang berhasil menyusun profil desa dengan baik	9 dokumen
3. Memfasilitasi pengelolaan Keuangan Desa	3. Jumlah desa yang mengelola keuangan dengan baik	9 desa
4. Memberikan Pelayanan Administrasi Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) non Komersial	4. Jumlah pelayanan administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) non komersil sesuai SOP	10 dokumen
5. Fasilitasi kegiatan Musrembang Tingkat Kecamatan	5. Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kegiatan Musrembang Tingkat Kecamatan	1 kegiatan

### Keterangan :

- \* Jumlah Program : 1 Program
- \* Jumlah Kegiatan : 1 Kegiatan
- \* Jumlah sub Kegiatan : 1 sub Kegiatan
- \* Jumlah Anggaran : **#REF!**

<b>1. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>9.990.000</b>
<b>1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>9.990.000</b>
a. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9.990.000

Bajuin, 3 Januari 2022

CAMAT BAJUIN

**NAHRIN FAUZI, S.Sos**  
NIP. 19690130 199002 1 002

KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DESA

**MUHAMMAD NOOR, S.Sos, M.AB**  
NIP. 19750309 200501 1 005



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## KECAMATAN BAJUIN

Jalan Bajuin Raya No.01 RT.06 Desa Bajuin

B A J U I N

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUNADI, SKM  
Jabatan : KASI KEMASYARAKATAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NAHRIN FAUZI, S.Sos  
Jabatan : CAMAT BAJUIN KABUPATEN TANAH LAUT

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bajuin, 3 Januari 2022

CAMAT BAJUIN,

**NAHRIN FAUZI, S.Sos**  
NIP.19690130 199002 1 002

KASI KEMASYARAKATAN,

**YUNADI, SKM**  
NIP.19670312 198903 1 013

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

JABATAN : KASI KEMASYARAKATAN  
OPD : KANTOR KECAMATAN BAJUIN  
TAHUN ANGGARAN : 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
1. Memberikan Pembinaan Kepada Kelompok Organisasi Masyarakat di bidang Kemasyarakatan	1. Jumlah Kelompok Organisasi Masyarakat yang dibina di bidang kemasyarakatan	1 kelompok
2. Memfasilitasi Kegiatan di bidang sosia, Keagamaan, Kebudayaan dan olahraga di tingkat Kecamatan	2. Jumlah Kegiatan di bidang Sosial, Keagamaan, Kebudayaan dan Olahraga yang sesuai SOP	4 kegiatan
3. Memfasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial di Kecamatan	3. Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang di Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial	747 KK

### Keterangan :

- \* Jumlah Program : 1 Program
- \* Jumlah Kegiatan : 1 Kegiatan
- \* Jumlah sub Kegiatan : 1 sub Kegiatan
- \* Jumlah Anggaran : Rp 352.080.625

1. PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	352.080.625
1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	352.080.625
a. Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	352.080.625

CAMAT BAJUIN



**NAHRIN FAUZI, S.Sos**  
NIP. 19690130 199002 1 002

Bajuin, 3 Januari 2022

KASI KEMASYARAKATAN



**YUNADI, SKM**  
NIP. 19670312 198903 1 013



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## KECAMATAN BAJUIN

Jalan Bajuin Raya No.01 RT.06 Desa Bajuin

B A J U I N

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAMSUDIN, S. Sos  
Jabatan : KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NAHRIN FAUZI, S.Sos  
Jabatan : CAMAT BAJUIN KABUPATEN TANAH LAUT

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bajuin, 3 Januari 2022

CAMAT BAJUIN,

**NAHRIN FAUZI, S.Sos**  
NIP.19690130 199002 1 002

KASI KETENTRAMAN DAN  
KETERTIBAN,

**SYAMSUDIN, S. Sos**  
NIP. 19660514 198903 1 010

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

JABATAN : KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN  
OPD : KANTOR KECAMATAN BAJUIN  
TAHUN ANGGARAN : 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
1. Memfasilitasi Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan	1. Jumlah penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat masyarakat di Kecamatan yang difasilitasi	1 kejadian
2. Membina kelompok Masyarakat di Bidang Ketentraman dan Ketertiban	2. Jumlah Kelompok Masyarakat di Bidang Ketentraman dan Ketertiban yang aktif	9 kelompok
3. Monitoring Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan	3. Jumlah Penanganan Gangguan dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan yang di monitoring	3 kejadian
4. Melakukan sosialisasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan	4. Jumlah Sosialisasi Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan yang di monitoring	1 kegiatan

Bajuin, 3 Januari 2022

CAMAT BAJUIN

**NAHRIN FAUZI, S.Sos**

NIP. 19690130 199002 1 002

KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

**SYAMSUDIN, S.Sos**

NIP.19660314 198903 1 010



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## KECAMATAN BAJUIN

Jalan Bajuin Raya No.01 RT.06 Desa Bajuin

B A J U I N

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANGGA RAMADHAN NOOR LUBIS, S.STP

Jabatan : KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. SAHRIYANUR, S.STP, M.Si

Jabatan : SEKRETARIS

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bajuin, 03 Januari 2022

SEKRETARIS,

H. SAHRIYANUR, S.STP, M.Si  
NIP. 19820323 200012 1 004

KASUBBAG PERENCANAAN  
DAN KEUANGAN,

ANGGA RAMADHAN NOOR LUBIS, S.STP  
NIP.19950227 201708 1 001

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

JABATAN : KASUBBAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN  
OPD : KANTOR KECAMATAN BAJUIN  
TAHUN ANGGARAN : 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
1. Menyusun Dokumen Perencanaan Kinerja dan Perencanaan Keuangan	1. Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	6 Dokumen
2. Menyusun Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun sesuai ketentuan	2. Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	4 Dokumen

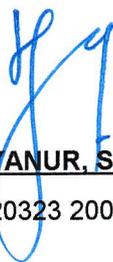
### Keterangan :

- \* Jumlah Program : 1 Program
- \* Jumlah Kegiatan : 1 Kegiatan
- \* Jumlah sub Kegiatan : 2 sub Kegiatan
- \* Jumlah Anggaran : Rp 2.460.230.609

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.460.230.609
1 Administrasi keuangan perangkat daerah	2.460.230.609
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.456.230.609
b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	4.000.000

Bajuin, 3 Januari 2022

SEKRETARIS



H. SAHRIYANUR, S.STP, M.Si

NIP. 19820323 200012 1 004

KASUBBAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN



ANGGA RAMADHAN NOOR LUBIS, S.STP

NIP. 19950227 201708 1 001



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## KECAMATAN BAJUIN

Jalan Bajuin Raya No.01 RT.06 Desa Bajuin

B A J U I N

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NASRULLAH FAHMI, SKM, M.PH

Jabatan : KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : PAIMUN, ST

Jabatan : SEKRETARIS CAMAT

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bajuin, 24 Februari 2022

SEKRETARIS CAMAT,

PAIMUN, ST

NIP. 19690512 200701 1 032

KASUBBAG PERENCANAAN  
DAN KEUANGAN,

NASRULLAH FAHMI, SKM, M.PH

NIP.19761229 199703 1 005

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

JABATAN : KASUBBAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN  
SOPD : KANTOR KECAMATAN BAJUIN  
TAHUN ANGGARAN : 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
1. Menyusun Dokumen Perencanaan Kinerja dan Perencanaan Keuangan	1. Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	6 Dokumen
2. Menyusun Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun sesuai ketentuan	2. Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	4 Dokumen

### Keterangan :

- \* Jumlah Program : 1 Program
- \* Jumlah Kegiatan : 1 Kegiatan
- \* Jumlah sub Kegiatan : 2 sub Kegiatan
- \* Jumlah Anggaran : Rp 2.460.230.609

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.460.230.609
KABUPATEN/KOTA	
1 Administrasi keuangan perangkat daerah	2.460.230.609
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.456.230.609
b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	4.000.000

Bajuin, 24 Februari 2022

SEKRETARIS

FAIMUN, ST

NIP. 19690512 200701 1 032

KASUBBAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN

NASRULLAH FAHMI, SKM, M.PH

NIP. 19761229 199703 1 005



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## KECAMATAN BAJUIN

Jalan Bajuin Raya No.01 RT.06 Desa Bajuin

B A J U I N

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LIDIA MIRANTI MAYASARI, SE  
Jabatan : PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ANGGA RAMADHAN NOOR LUBIS, S.STP  
Jabatan : KASUBBAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bajuin, 3 Januari 2022

KASUBBAG. PERENCANAAN DAN  
KEUANGAN,

PENYUSUN PROGRAM  
ANGGARAN DAN PELAPORAN,

  
ANGGA RAMADHAN NOOR LUBIS, S.STP  
NIP.19950227 201708 1 001

  
LIDIA MIRANTI MAYASARI, SE  
NIP. 19840817 200903 2 002

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

JABATAN : PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN  
SOPD : KANTOR KECAMATAN BAJUIN  
TAHUN ANGGARAN : 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
1. Menerima dan memeriksa bahan dan data Program Anggaran Pelaporan sesuai prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan	1. Jumlah dokumen bahan data program anggaran dan pelaporan yang diterima dan diperiksa	10 Dokumen
2. Mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan dan data Program Anggaran dan Pelaporan sesuai spesifikasi dan prosedur untuk memudahkan apabila diperlukan	2. Jumlah dokumen hasil pengklasifikasian bahan dan data program anggaran dan pelaporan	10 Dokumen
3. Mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang terkait dengan program anggaran sesuai prosedur dalam rangka penyusunan program anggaran dan pelaporan	3. Jumlah dokumen hasil kajian karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang terkait dengan program anggaran dan pelaporan	20 Dokumen
4. Menyusun konsep penyusunan program anggaran dan pelaporan sesuai dengan hasil kajian dan prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan	4. Jumlah dokumen konsep penyusunan program anggaran dan pelaporan	10 Dokumen
5. Mendiskusikan konsep penyusunan program anggaran dan pelaporan dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur untuk kesempurnaan penyusunan program anggaran dan pelaporan	5. Jumlah kegiatan diskusi konsep penyusunan program anggaran dan pelaporan hasil perbaikan dari diskusi	15 kegiatan
6. Menyusun kembali program anggaran dan pelaporan berdasarkan hasil diskusi sesuai prosedur untuk kelancaran dan optimalisasi penyusunan program anggaran dan pelaporan	6. Jumlah laporan hasil evaluasi proses penyusunan program anggaran dan pelaporan	25 Dokumen
7. Mengevaluasi proses penyusunan program anggaran dan pelaporan sesuai prosedur sebagaibahan perbaikan dan kesempurnaan tercapainya sasaran	7. Jumlah laporan hasil evaluasi proses penyusunan program anggaran dan pelaporan	20 Laporan
8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	8. Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilaporkan	50 Laporan
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	9. Jumlah laporan kegiatan tugas kedinasan lain	50 Laporan

Bajuin, 3 Januari 2022

**KASUBBAG. PERENCANAAN DAN  
KEUANGAN,**

  
**ANGGA RAMADHAN NOOR LUBIS, S.STP**  
NIP. 199502272017081001

**PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPC**

  
**LIDIA MIRANTI MAYASARI, SE**  
NIP. 19840817 200903 2 002



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## KECAMATAN BAJUIN

Jalan Bajuin Raya No.01 RT.06 Desa Bajuin

B A J U I N

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BUDIARTO  
Jabatan : PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM PADA  
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN KEC. BAJUIN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ANGGA RAMADHAN NOOR LUBIS, S.STP  
Jabatan : KASUBBAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bajuin, 3 Januari 2022

KASUBBAG. PERENCANAAN DAN  
KEUANGAN,

**ANGGA RAMADHAN NOOR LUBIS, S.STP**  
NIP.19950227 201708 1 001

PENGADMINISTRASI  
PERENCANAAN DAN PROGRAM,

**BUDIARTO**  
NIP. 19800901 200901 1 003

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

JABATAN : PENGADMINISTRASI PERENCANAAN & PROGRAM PADA  
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN KEC. BAJUIN

OPD : KANTOR KECAMATAN BAJUIN

TAHUN ANGGARAN : 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
1. Menerima, mencatat dan menyortir administrasi perencanaan dan program sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian	1. Jumlah administrasi perencanaan dan program yang disortir	120 Dokumen
2. Memberi lembar pengantar pada administrasi perencanaan dan program sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian	2. Jumlah administrasi perencanaan dan program yang diberi lembar pengantar	120 Dokumen
3. Mengelompokkan administrasi perencanaan dan program atau dokumen menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pendistribusian	3. Jumlah administrasi perencanaan dan program yang dikelompokkan	120 Dokumen
4. Mendokumentasikan administrasi perencanaan dan program sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi	4. Jumlah administrasi perencanaan dan program yang didokumentasikan	120 Dokumen
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	5. Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas	120 Laporan
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	6. Jumlah laporan kegiatan tugas kedinasan lain	120 Laporan

Bajuin, 3 Januari 2022

**KASUBBAG. PERENCANAAN DAN  
KEUANGAN**

  
**ANGGA RAMADHAN NOOR LUBIS, S.STP**  
NIP. 19950227 201708 1 001

**PENGADMINISTRASI PERENCANAAN  
DAN PROGRAM**

  
**BUDIARTO**  
NIP. 19800901 200901 1 003



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## KECAMATAN BAJUIN

Jalan Bajuin Raya No.01 RT.06 Desa Bajuin

B A J U I N

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURUL HASANAH, A.Md  
Jabatan : PENGOLAH DATA PELAYANAN PADA SEKSI PELAYANAN  
KECAMATAN BAJUIN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : AKHMAD RIDHA S.KEP, NERS  
Jabatan : KASI PELAYANAN

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bajuin, 3 Januari 2022

KASI PELAYANAN,

**AKHMAD RIDHA S.KEP, NERS**  
NIP.19741010 199502 1 001

PENGOLAH DATA PELAYANAN,

**NURUL HASANAH, A.Md**  
NIP. 19980818 202012 2 007

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

JABATAN : PENGOLAH DATA PELAYANAN PADA SEKSI PELAYANAN KECAMATAN BAJUIN  
 SOPD : KANTOR KECAMATAN BAJUIN  
 TAHUN ANGGARAN : 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
1. Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan teknik dalam mengolah data dan penyajian data	1. Jumlah dokumen pedoman dan petunjuk yang dipelajari	15 Dokumen
2. Mengumpulkan dan memeriksa data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan-bahan kegiatan berdasarkan jenis data pelayanan untuk disajikan	2. Jumlah laporan hasil pemeriksaan data	15 Laporan
3. Menganalisis data dan penyajian data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan kebenaran informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk	3. Jumlah dokumen hasil analisis data	2 Dokumen
4. Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis data dan penyajian data yang masuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui volume dan jenis obyek kerja yang akan di olah	4. Jumlah dokumen hasil rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis data dan penyajian data	15 Dokumen
5. Mencatat perkembangan dan permasalahan pengumpulan dan penyajian data secara periodik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui langkah pemecahannya	5. Jumlah dokumen perkembangan dan permasalahan pengumpulan dan penyajian data secara periodik	2 Dokumen
6. Mengolah dan menyajikan data dalam bentuk yang telah ditetapkan sebagai bahan proses lebih lanjut	6. Jumlah dokumen data yang disajikan	15 Dokumen
7. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	7. Jumlah laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan	12 Laporan
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan	8. Jumlah laporan tugas kedinasan lain	10 Laporan

Bajuin, 03 Januari 2022

KASI PELAYANAN



**AKHMAD RIDHA, S. KEP. NERS**  
 NIP.19741010 199502 1 001

PENGOLAH DATA PELAYANAN



**NURUL HASANAH, A.Md**  
 NIP. 19980818 202012 2 007



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN BAJUIN

Jalan Bajuin Raya No.01 RT.06 Desa Bajuin

B A J U I N

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAISAL KHALIL, S.Sos  
Jabatan : KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. SAHRIYANUR, S.STP, M.Si

Jabatan : SEKRETARIS

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bajuin, 3 Januari 2022

SEKRETARIS,

KASUBBAG UMUM DAN  
KEPEGAWAIAN,

  
H. SAHRIYANUR, S.STP, M.Si  
NIP. 19820323 200012 1 004

  
FAISAL KHALIL, S.Sos  
NIP. 19810201 200701 1 007

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

JABATAN : KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
SOPD : KANTOR KECAMATAN BAJUIN  
TAHUN ANGGARAN : 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
1. Memberikan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Jumlah ASN yang administrasi perkantorannya terlayani dengan baik	14 Orang
2. Pemenuhan Sarana dan Prasanana Kantor	2. Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan Baik	367 Unit
3. Memberikan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	2. Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	14 Dokumen

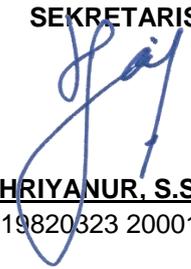
### Keterangan :

- \* Jumlah Program : 1 Program
- \* Jumlah Kegiatan : 3 Kegiatan
- \* Jumlah sub Kegiatan : 11 sub Kegiatan
- \* Jumlah Anggaran : **Rp 472.528.810**

<b>1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>472.528.810</b>
<b>1. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>144.096.717</b>
a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.925.687
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.076.130
c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.614.900
d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.480.000
e. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50.000.000
<b>2. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>226.531.049</b>
a. Penyediaan Jasa,Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	18.699.345
b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	207.831.704
<b>3. Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>101.901.044</b>
a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	27.500.000
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.500.000
c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.750.000
d. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	15.151.044

Bajuin, 3 Januari 2022

SEKRETARIS

  
**H. SAHRIYANUR, S.STP, M.Si**  
NIP. 19820323 200012 1 004

KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN

  
**FAISAL KHALIL, S.Sos**  
NIP. 19810201 200701 1 007



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN BAJUIN

Jalan Bajuin Raya No.01 RT.06 Desa Bajuin  
BAJUIN

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FERRY ANANDA, A.M.d. Pjk  
Jabatan : PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR PADA  
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN KEC.BAJUIN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FAISAL KHALIL, S.Sos  
Jabatan : KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bajuin, 3 Januari 2022

KASUBBAG. UMUM DAN  
KEPEGAWAIAN,

  
FAISAL KHALIL, S.Sos  
NIP. 19810201 200701 1 007

PENGELOLAAN SARANA DAN  
PRASARANA KANTOR,

  
FERRY ANANDA, A.M.d. Pjk  
NIP. 19850325 200801 1 007

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

JABATAN : PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR PADA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN KEC.BAJUIN  
OPD : KANTOR KECAMATAN BAJUIN  
TAHUN ANGGARAN : 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
1. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik	1. Jumlah dokumen program kerja, bahan dan alat perlengkapan pengelolaan sarana dan prasarana kantor	4 Dokumen
2. Memantau Sarana dan Prasarana Kantor sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal	2. Jumlah kegiatan pemantauan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai dengan bidang tugasnya	36 Dokumen
3. Mengendalikan program kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan	3. Jumlah dokumen hasil pengendalian program	40 Dokumen
4. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal	4. Jumlah pelaksanaan program yang dikoordinasikan	20 Dokumen
5. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya	5. Jumlah laporan berkala yang disusun	24 Laporan
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan	6. Jumlah laporan kegiatan tugas kedinasan lain	30 Laporan

Bajuin, 3 Januari 2022

KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN

  
**FAISAL KHALIL, S.Sos**  
NIP. 19810201 200701 1 007

PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR

  
**FERRY ANANDA, A.M.d. Pjk**  
NIP. 19850325 200801 1 007



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN BAJUIN

Jalan Bajuin Raya No.01 RT.06 Desa Bajuin

B A J U I N

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. IDI ANPARI  
Jabatan : PENGADMINISTRASIAN UMUM PADA SEKSI  
KEMASYARAKATAN KEC. BAJUIN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : YUNADI, SKM  
Jabatan : KASI KEMASYARAKATAN

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bajuin, 3 Januari 2022

KASI KEMASYARAKATAN,

YUNADI, SKM  
NIP. 19670312 198903 1 013

PENGADMINISTRASIAN UMUM,

M.IDI ANPARI  
NIP.19640407 201212 1 001

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

JABATAN : PENGADMINISTRASIAN UMUM PADA SEKSI  
KEMASYARAKATAN KEC. BAJUIN  
OPD : KANTOR KECAMATAN BAJUIN  
TAHUN ANGGARAN : 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
1. Menerima, mencatat dan menyortir administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian	1. Jumlah administrasi umum yang disortir	240 Dokumen
2. Memberi lembar pengantar pada administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian	2. Jumlah administrasi umum yang diberi lembar pengantar	240 Dokumen
3. Mengelompokkan administrasi umum atau dokumen menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pendistribusian	3. Jumlah administrasi umum yang dikelompokkan	60 Dokumen
4. Mendokumentasikan administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi	4. Jumlah administrasi umum yang didokumentasikan	60 Dokumen
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban	5. Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas	12 Laporan
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	6. Jumlah laporan kegiatan tugas kedinasan lain	12 Laporan

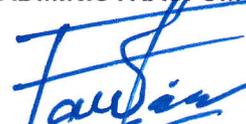
Bajuin, 3 Januari 2022

KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN



**YUNADI SKM**  
NIP. 19670312 198903 1 013

PENGADMINISTRASIAN UMUM



**M. IDIANPARI**  
NIP. 19640407 20212 1 001